

**Pengaruh Pengungkapan Pertanggungjawaban Sosial, Tata Kelola
Perusahaan dan *Leverage* terhadap Agresivitas Penghindaran Pajak**

Disusun Oleh

Rizky Nurul Aini

NIM. 145020300111021

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Meraih Derajat Gelar Sarjana Ekonomi



JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2018

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**PENGARUH PENGUNGKAPAN PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL,
TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN *LEVERAGE* TERHADAP
AGRESIVITAS PENGHINDARAN PAJAK**

Yang disusun oleh:

Nama : Rizky Nurul Aini

NIM : 145020300111021

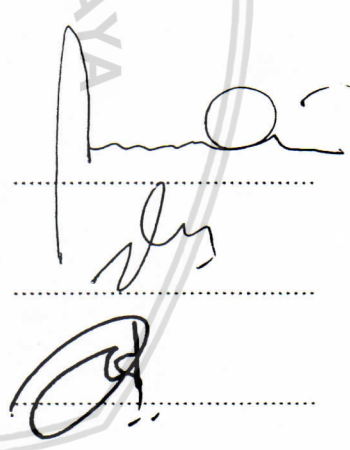
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 20 Agustus 2018 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Komarudin Achmad, M.Si., Ak.
NIP. 196507281992031002
(Dosen Pembimbing)
2. Devy Pusposari, M.Si., Ak.
NIP. 197511052003122001
(Dosen Penguji 1)
3. Ayu Fury Puspita, MSA., Ak., CA.
NIP. 2013128812142001
(Dosen Penguji 2)



Malang, 29 Agustus 2018

Ketua Program Studi S1 Akuntansi



Dr. Dra. Endang Mardiaty, M.Si., Ak.

NIP. 195909021986012001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizky Nurul Aini
NIM : 145020300111021
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya susun dengan judul:

**PENGARUH PENGUNGKAPAN PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL,
TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN *LEVERAGE* TERHADAP
AGRESIVITAS PENGHINDARAN PAJAK**

adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari Skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan Saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya).

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Malang, 06 Agustus 2018

Pembuat Pernyataan,



Rizky Nurul Aini

NIM. 145020300111021

CURRICULUM VITAE

PERSONAL DETAILS



Full Name : Rizky Nurul Aini
Nick Name : Nurul
Current Address : Bunga Andong Selatan Street Kav 38
Host Address : Swasembada Barat 15 Street No. 22A RT/RW
005/014, Tg. Priok, Jakarta Utara 14320
Place of Birth : Jakarta
Date of Birth : October 26th 1996
Gender : Woman
Phone Number : 082112792943
Email : nurulrizkya26@gmail.com

FORMAL EDUCATION

2014-now Faculty of Economic and Business University of Brawijaya, Malang (Majoring Akuntansi, with concentration of Tax) With IPK (Until 6th semester is 3.46 out of 4.00)
2011-2014 13 Senior High School, Jakarta
2008-2011 95 Junior High School, Jakarta
2002-2008 Hang Tuah 1 Elementary School, Jakarta

EXPERIENCES IN ORGANIZATIONS

2016 Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi 2016 – Staff In Entrepreneur Departement.
2015 Student Executive Board Faculty of Economics and Business University of Brawijaya 2015 – Staff in Human Resource Department

EXPERIENCES IN COMMITTEES

2016 Economic Sport and Talent (EST) Brawijaya 2016 – Coordinator of Medical and Consumption
2016 HORE CUP 2016 – Coordinator Assistant of Publication
2015 Economic Awards 2015 – Coordinator of Marketing
2015 FEB CUP 2015 – Coordinator Assistant of Medical and Consumption
2015 KM FEB Day 2 – Coordination of Consumption
2015 Good Personality Session 2015 – Chief Executive
2013 Galas Flagtrrop Event 2013 – Coordinator of Public Relation

SELF QUALIFICATION

- Good Accounting Skill
- Good Computer Skill (Ms Word, Ms Excel, Ms PowerPoint, Ms Visio, Photoshop (basic), Windows Movie Maker (basic), and Internet)
- Language Skill

Bahasa	Ability to Read	: Excellent	English	Ability to Read	: Excellent
	Ability to Write	: Good		Ability to Write	: Excellent
	Ability to Speak	: Excellent		Ability to Speak	: Good

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT. atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat melaksanakan dan menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENGARUH PENGUNGKAPAN PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL, TATA KELOLA PERUSAHAAN, DAN *LEVERAGE* TERHADAP AGRESIVITAS PENGHINDARAN PAJAK”**. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat Sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa dalam pelaksanaan dan penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, petunjuk, nasihat, dan bimbingan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat mengatasi kesulitan yang timbul dengan lancar. Penulis hanya dapat mengucapkan terima kasih, do'a yang tulus dan rasa hormat yang penulis tujuikan kepada:

1. Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua.
2. Bapak Dr. Drs. Roekhudin, M.Si., Ak. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
3. Bapak Komarudin Achmad, M.Si., Ak. selaku dosen pembimbing yang telah senantiasa memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Devy Pusposari, M.Si., Ak. selaku dosen penguji 1 yang senantiasa memberi kritik dan saran untuk perbaikan skripsi ini.
5. Ibu Ayu Fury Puspita, M.S.A., Ak. selaku dosen penguji 2 yang senantiasa memberi kritik dan saran untuk perbaikan skripsi ini.
6. Kedua orangtua yakni Ibu Lili Komariah yang telah menjadi ibu terhebat dan tertangguh serta Alm. Bapak Julizar. Adikku yakni Muhammad Daffa Akbar Fahrizky yang selalu menguatkan, serta seluruh keluarga besar yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang selalu memberikan motivasi dan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Rosalia Octaviani selaku teman pertama di Malang yang selalu memberikan bantuan, dukungan, semangat, dan meminjamkan kamar kosannya untuk diriku mengerjakan dalam mengerjakan skripsi yang Alhamdulillah selesai juga.

8. Nadya Septy Dasapradani selaku teman sepejuangan yang selalu menghibur dikala sedih, memberikan semangat, dukungan, dan pengalaman yang selalu bikin ketawa kalo diingat.
9. Bulan Rahma Nindita, Nuraviah Awwalul Dini dan Putri Maulida yang sudah membuat diriku betah selama di Malang dan membuat suasana merantau menjadi jauh lebih menyenangkan.
10. Danar Bayu Aji yang selalu mau menemaniku ketika bimbingan, Dzaid Al Kautsar yang sudah membantuku seminggu sebelum sidang, Yandwika Nandiwardana S yang sudah memberi masukan untuk skripsi ini, dan Glen Grazia Yonadie yang sudah memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih sudah membuat grup menjadi ramai dengan kekocakan kalian.
11. Nadya Ulfa Widjaya selaku teman kostku. Terimakasih sudah menjadi tempat curhat dan selalu mengingatkan untuk tetap bersyukur atas nikmat Allah.
12. Annisa, Aprilia, Lintang, Febbyan, Dhea, Monic, Priska, dan Luthfia yang selalu memberikan semangat untukku menyelesaikan skripsi ini dan menungguku pulang ke Jakarta.
13. Teman satu bimbingan yaitu Risa, Gilang, Pradit dan lain-lain yang berjuang dan saling membantu untuk mendapatkan gelar sarjana ekonomi bersama-sama.
14. Teman-teman akuntansi 2014 yang saling support untuk meraih gelar sarjana ekonomi bersama-sama
15. Pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-satu, yang telah memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan, untuk itu setiap kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima demi kesempurnaan skripsi ini kedepannya.

Malang, 30 Agustus 2018

Penulis

**PENGARUH PENGUNGKAPAN PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL,
TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN *LEVERAGE* TERHADAP
AGRESIVITAS PENGHINDARAN PAJAK**

Oleh:

**Rizky Nurul Aini
145020300111021**

Dosen Pembimbing:

Komarudin Achmad, SE.,M.Si.,Ak.

ABSTRAK

Penghindaran pajak telah menjadi sebuah fenomena umum yang terjadi di sejumlah perusahaan. Sudah banyak kasus-kasus penghindaran pajak yang terjadi, terutama pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Padahal perusahaan manufaktur menjadi penyumbang pajak terbesar sejak tahun 2013, namun beberapa perusahaan manufaktur terbukti melakukan upaya penghindaran pajak. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh pengungkapan pertanggungjawaban sosial, tata kelola perusahaan, dan *leverage* terhadap agresivitas penghindaran pajak. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 104 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2016, menggunakan metode *purposive sampling*. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban sosial, tata kelola perusahaan yaitu kepemilikan institusional dan *leverage* berpengaruh negatif terhadap agresivitas penghindaran pajak. Penelitian ini gagal membuktikan bahwa komisaris independen dan komite audit berpengaruh negatif terhadap agresivitas penghindaran pajak.

**Kata kunci: Pengungkapan Pertanggungjawaban Sosial, Tata Kelola
Perusahaan, *Leverage*, Agresivitas Penghindaran Pajak**

**THE EFFECT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
DISCLOSURE, GOOD CORPORATE GOVERNANCE, AND LEVERAGE ON
TAX AVOIDANCE AGRESSIVENESS**

By:

**Rizky Nurul Aini
145020300111021**

Supervisor:

Komarudin Achmad, SE., M.Si., Ak.

ABSTRACT

Tax avoidance has become a common phenomenon that occurs in a number of companies. There have been many cases of tax evasion, especially in manufacturing companies in Indonesia. Even though manufacturing companies are the biggest tax contributors since 2013, some manufacturing companies have proven to be tax evasion. This study aims to provide empirical evidence about the influence of Corporate Social Responsibility Disclosure, Good Corporate Governance, and leverage on tax avoidance agressiveness. The number of samples used in this study is 104 manufacturing companies listed in the Indonesia Stock Exchange in 2015-2016, which were selected through purposive sampling method. This study uses multiple linear regression analysis. The result of this study shows that Corporate Social Responsibility, institutional ownership, and leverage have a negative affect to tax avoidance agressivenes. This study failed to prove that independent commissioners and audit committees negatively affect the aggressiveness of tax avoidance.

Keywords: Corporate Social Responsibility Disclosure, Good Corporate Governance, Leverage, Tax Avoidance Agressiveness

DAFTAR ISI

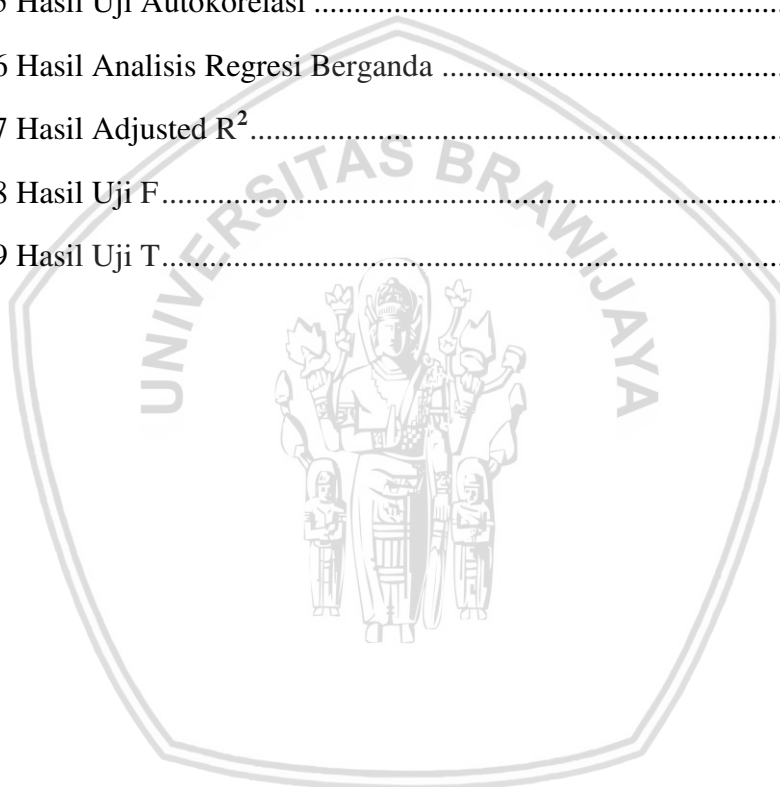
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	13
BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS	14
2.1 Telaah Pustaka	14
2.1.1 Teori Legitimasi	14
2.1.2 Teori <i>Debt Covenant</i>	16
2.1.3 Teori Agensi	17
2.1.4 Penghindaran Pajak	19
2.1.5 Pertanggungjawaban Sosial	23
2.1.6 Tata Kelola Perusahaan	26
2.1.7 <i>Leverage</i>	30
2.2 Pengembangan Hipotesis	31
2.2.1 Pertanggungjawaban Sosial	31
2.2.2 Kepemilikan Institusional	33
2.2.3 Komisaris Independen	35
2.2.4 Komite Audit	37
2.2.5 <i>Leverage</i>	39
2.3 Kerangka Teoritis	40

BAB III : METODE PENELITIAN	44
3.1 Jenis Penelitian	44
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian	44
3.3 Data Penelitian dan Sumber Data	45
3.3.1 Jenis dan Sumber Data	45
3.3.2 Teknik Pengumpulan Data	46
3.4 Definisi Operasional Variabel	46
3.4.1 Variabel Dependen	46
3.4.2 Variabel Independen	47
3.4.2.1 Pertanggungjawaban Sosial	47
3.4.2.2 Kepemilikan Institusional	48
3.4.2.3 Komisaris Independen	48
3.4.2.4 Komite Audit	42
3.4.2.5 <i>Leverage</i>	49
3.5 Metode Analisis Data	50
3.5.1 Uji Asumsi Klasik	50
3.5.1.1 Uji Normalitas	50
3.5.1.2 Uji Multikolinearitas	50
3.5.1.3 Uji Heteroskedastisitas	51
3.5.1.4 Uji Autokorelasi	51
3.5.2 Pengujian Hipotesis	52
3.5.2.1 Model Pengujian	52
3.5.2.2 Uji F	52
3.4.2.3 Uji T	53
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
4.1 Hasil Penelitian	54
4.1.1 Data Penelitian	54

4.1.2 Statistik Deskriptif.....	55
4.1.3 Hasil Pengujian Asumsi Klasik.....	57
4.1.4 Hasil Pengujian Hipotesis	61
4.1.4.1 Analisis Regresi Berganda	61
4.1.4.2 Pengujian Hipotesis Uji F	64
4.1.4.3 Pengujian Hipotesis Uji T	65
4.2 Pembahasan	66
4.2.1 Pertanggungjawaban Sosial.....	66
4.2.2 Kepemilikan Institusional.....	68
4.2.3 Komisaris Independen.....	70
4.2.4 Komite Audit.....	71
4.2.5 <i>Leverage</i>	73
BAB V : PENUTUP	76
5.1 Kesimpulan	76
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	77
5.3 Saran	77
DAFTAR PUSTAKA.....	79

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Perhitungan Penentuan Sampel.....	54
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif	55
Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas	58
Tabel 4.4 Pengujian Multikolinieritas.....	59
Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi	61
Tabel 4.6 Hasil Analisis Regresi Berganda	62
Tabel 4.7 Hasil Adjusted R^2	64
Tabel 4.8 Hasil Uji F.....	64
Tabel 4.9 Hasil Uji T.....	65



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Hasil Uji Heterokedastisitas	60
---	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keinginan perusahaan untuk mendapatkan laba yang maksimal menjadikan pajak sebagai beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan bukan sebagai kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan. Pajak yang seharusnya merupakan kewajiban sebuah perusahaan malah dianggap sebagai beban yang akan mengurangi laba perusahaan, sehingga perusahaan akan melakukan strategi-strategi untuk mengurangi beban pajaknya (Kurniasih Sari, 2013). Menurut Lanis dan Richardson (2012) pajak dapat dijadikan motivasi perusahaan dalam membuat keputusan yang mana perusahaan akan melakukan tindakan manajerial untuk meminimalkan pajak perusahaan dengan melakukan manajemen pajak.

Menurut Lumbatoruan (1996) dalam Suandy (2016:6), manajemen pajak merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba yang diharapkan. Tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang salah satunya adalah perencanaan pajak (*tax planning*). Jika tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tapi berbeda dengan tujuan pembuat undang-undang, maka perencanaan pajak disini sama dengan penghindaran pajak karena secara hakikat ekonomis keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak. Motivasi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak

adalah meminimalkan beban pajak agar nilai perusahaan dapat maksimal (Kurniasih dan Sari, 2013).

Penghindaran pajak merupakan suatu upaya meminimalisasi beban pajak bagi perusahaan dengan cara yang legal dikarenakan adanya ketidaksempurnaan dalam Undang-Undang Perpajakan (Kurniasih dan Sari, 2013). Menurut Sumarsan (2015:116) penghindaran pajak adalah wajib pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang sekalipun kadang-kadang dengan jelas menafsirkan undang-undang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pembuat undang-undang. Dalam Lanis dan Richardson (2012) usaha penghindaran pajak berlebih disebut dengan agresivitas penghindaran pajak. Agresivitas penghindaran pajak yaitu adanya usaha lebih dari suatu perusahaan untuk meminimalkan beban pajak dengan tujuan untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Agresivitas penghindaran pajak dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan kelemahan-kelemahan ketentuan perpajakan yang ada. Semakin lemahnya peraturan yang mendukung pengenaan pajak maka semakin agresif usaha perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Saat ini penghindaran pajak telah menjadi sebuah fenomena umum yang terjadi di sejumlah perusahaan. Sudah banyak kasus-kasus penghindaran pajak yang terjadi, terutama pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Padahal perusahaan manufaktur menjadi penyumbang pajak terbesar sejak tahun 2013, namun beberapa perusahaan manufaktur terbukti melakukan upaya penghindaran pajak. Apabila penghindaran pajak melebihi batas atau melanggar hukum dan ketentuan yang berlaku maka aktivitas tersebut dapat tergolong ke dalam penggelapan pajak (*tax*

evasion). Contohnya kasus Penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN). Kasus ini terjadi karena pemisahan perusahaan perakitan mobil (*manufacturing*). Pemisahan perusahaan ini mengakibatkan terjadinya penurunan gross margin sebesar 7%, yang seharusnya jika digabungkan dapat menghasilkan gross margin sebesar 14%. Hal ini yang membuat Dirjen Pajak mempertanyakan perbedaan selisih dari *gross margin* ini, karena pemisahan perusahaan ini seharusnya tidak berdampak pada berkurangnya keuntungan (*gross margin*) (Rahayu, 2013).

Selain itu juga terdapat contoh kasus yang terjadi pada tahun 2006 yang dilakukan oleh Asian Agri Group (AAG). Mahkamah Agung memberikan vonis kepada 14 perusahaan Asian Agri Group (AAG), hal ini diakibatkan terungkapnya penggelapan pajak. Penggelapan yang dilakukan oleh perusahaan Asian Agri Group adalah dengan melakukan transfer pricing. Perusahaan Asian Agri Group (AAG) menjual produk minyak sawit mentah (Crude Palm Oil) ke perusahaan afiliasi di luar negeri dengan harga di bawah harga pasar, dan kemudian dijual kembali ke pembeli riil dengan harga tinggi, maka beban pajak di dalam negeri dapat ditekan. Selain itu, rekanan perusahaan Asian Agri Group sebagian besar adalah perusahaan fiktif. Diperkirakan penggelapan pajak yang dilakukan perusahaan Asian Agri Group (AAG) telah merugikan negara sejumlah Rp 1,3 triliun (Rahayu, 2013).

Kasus-kasus penghindaran pajak di atas menunjukkan bahwa sebagian besar tindakan ini dimotivasi oleh usaha perusahaan melakukan penghindaran dan

penghematan pajak, guna mengurangi biaya pembayaran pajak agar lebih kecil. Hal ini didukung dengan prinsip yang dimiliki oleh perusahaan yaitu berusaha untuk menghasilkan laba sebesar-besarnya dengan cara mengurangi biaya-biaya perusahaan termasuk biaya untuk membayar pajak, jika diperlukan perusahaan akan berusaha untuk dapat menghilangkan biaya untuk membayar pajak. Oleh karenanya persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik. Di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan karena tidak melanggar peraturan tetapi di sisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan (Budiman & Setiyono, 2012).

Menurut Avi-Yonah (2008) tujuan dari meminimalkan jumlah pajak perusahaan yang akan dibayar menjadi salah satu hal yang harus dipahami dan melibatkan beberapa etika, masyarakat atau adanya pertimbangan dari pemangku kepentingan perusahaan. Menurut Prakoso (2014), tindakan penghindaran pajak akan memunculkan risiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan dimata publik yang akan mengancam keberlangsungan hidup perusahaan tersebut. Teori legitimasi merupakan adanya kontrak sosial perusahaan terhadap masyarakat dan adanya pengungkapan sosial lingkungan. Dalam teori legitimasi, pada dasarnya keberlangsungan hidup perusahaan tergantung pada legitimasi (pengakuan) dari masyarakat sekitarnya. Cara mendapatkan legitimasi perusahaan salah satunya dengan melakukan pertanggungjawaban sosial. Ketika perusahaan melakukan pertanggungjawaban sosial maka perusahaan tersebut akan mendapatkan sorotan lebih dari masyarakat maka perusahaan tersebut akan memiliki keterbatasan

untuk melakukan kecurangan. Salah satu bentuk kecurangan yang dapat terjadi adalah dengan melakukan penghindaran pajak.

Menurut Suparno (2010), pertanggungjawaban sosial merupakan tanggung jawab moral perusahaan terhadap masyarakat seperti kepada pemodal, kepada karyawan perusahaan, kepada perusahaan lain, pemasok, konsumen, penyalur, media massa, masyarakat sekitar, pemerintah, dan lain-lain. Pengungkapan pertanggungjawaban sosial merupakan suatu kewajiban bagi setiap perusahaan yang diatur oleh pemerintah dalam Undang-Undang RI No. 47 tahun 2012 tentang “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”. Dalam pasal 2 Undang-Undang RI No. 47 tahun 2012 menyebutkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan harus dilakukan oleh setiap perseroan selaku subjek hukum. Diperjelas dalam pasal 3, Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial baik di dalam maupun di luar lingkungan perseroan berdasarkan Undang-Undang.

Menurut Lanis dan Richardson (2012) pajak yang dibayar perusahaan dengan seminimalnya merupakan tindakan yang tidak diharapkan oleh masyarakat karena pajak memiliki implikasi penting bagi pendanaan masyarakat. Pandangan masyarakat mengenai perusahaan yang melakukan tindakan penghindaran pajak dianggap membentuk suatu kegiatan yang tidak bertanggung jawab secara sosial dan tidak sah. Apalagi perusahaan juga diwajibkan melakukan tanggung jawab sosial Hal ini berarti

penghindaran pajak berdampak negatif bagi perusahaan karena tidak melakukan tanggung jawab sosial seperti apa yang diharapkan masyarakat. Ketika perusahaan melakukan kegiatan pertanggungjawaban sosial dan menyajikan pengungkapan pertanggungjawaban sosial maka legitimasi (pengakuan) dan kepercayaan dari masyarakat akan meningkat dan diharapkan perusahaan akan meminimalisasikan tindakan penghindaran pajak agar tetap mendapatkan pengakuan dari masyarakat.

Penelitian terdahulu mengenai pertanggungjawaban sosial dengan penghindaran pajak dilakukan oleh Lanis dan Richardson (2012), menemukan bahwa terjadi hubungan negatif antara pertanggungjawaban sosial terhadap penghindaran pajak perusahaan. Penelitian lain mengenai pertanggungjawaban sosial dengan penghindaran pajak dilakukan oleh Jessica dan Toli (2014), menemukan bahwa pertanggungjawaban sosial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tidak dapat lepas dari teori agensi. Teori agensi membantu menjelaskan kecenderungan penghindaran pajak perusahaan. Penghindaran pajak perusahaan membuka peluang bagi manajer untuk bersikap oportunistik dengan melakukan penghindaran pajak untuk tujuan keuntungan jangka pendek (Puspita dan Harto, 2014). Menurut Hendriksen dan Breda (1992) dalam Kurniasih dan Sari (2013), teori agensi merupakan hubungan kontrak antara manajemen suatu usaha yang disebut *agent* dan pemilik usaha yang disebut *principal*. Berdasarkan teori agensi, pemegang saham dapat mempengaruhi manajer untuk melakukan penghindaran pajak seminimal mungkin (Desai dan Dharmapala, 2006). *Corporate governance* merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan

hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kerja perusahaan (Annisa & Kurniasih, 2012). Penerapan *corporate governance* bertujuan untuk meminimumkan konflik keagenan (Darmawan & Sukartha, 2014). Menurut Kurniasih dan Sari (2013) *Good Corporate Governance* bertujuan untuk meminimalkan perbedaan kepentingan antara manajer dan pemilik suatu perusahaan yang berkaitan dengan keadaan baik-buruknya tata kelola suatu perusahaan dengan tindakan pengambilan keputusan perpajakannya. Dalam teori agensi tata kelola perusahaan yang baik dapat memainkan peran yang penting dalam memantau, mendisiplinkan, dan mempengaruhi manajer dan memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk berperilaku mementingkan diri sendiri. Termasuk dalam hal melakukan manajemen pajak. Sehingga semakin baiknya tata kelola dalam suatu perusahaan maka hubungan antara principal dan manajer juga akan semakin baik. Hal tersebut membuat manajer tidak dapat berperilaku mementingkan diri sendiri dan diharapkan manajer akan meminimalisasi tindakan penghindaran pajak karena principal akan berupaya untuk mengawasi kegiatan manajer. Mekanisme *Good Corporate Governance* ditandai dengan adanya kepemilikan institusional, komisaris independen, dan keberadaan komite audit.

Menurut Wahidahwati (2002) menyatakan bahwa kepemilikan institusional merupakan persentase saham yang dimiliki oleh pihak institusi perusahaan pada akhir tahun. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin besar pengawasan yang dilakukan oleh pihak eksternal. Dalam teori agensi, pemilik institusional berdasarkan besar dan hak suara yang dimiliki, dapat memaksa manajer untuk

berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk berperilaku mementingkan diri sendiri. Hal ini akan berdampak pada keputusan manajer untuk tidak melakukan tindakan penghindaran pajak.

Penelitian terdahulu tentang kepemilikan institusional dengan penghindaran pajak dilakukan oleh Ngadiman dan Puspitasari (2014), menemukan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Annisa dan Kurniasih (2012) yang menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kepemilikan institusional dengan penghindaran pajak.

Menurut Boediono (2005), komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Teori agensi menyatakan bahwa, dalam menjalankan fungsi pengawasan, dewan komisaris dapat mempengaruhi pihak manajemen untuk menyusun laporan keuangan berkualitas. Dewan komisaris dapat mempengaruhi pengambilan keputusan perpajakan perusahaan, terutama pada prinsip transparansi. Dengan adanya keterbukaan informasi diharapkan perusahaan akan cenderung mengambil tindakan perpajakan yang tidak berisiko dengan tidak melakukan penghindaran pajak (Sari dan Martani, 2010).

Penelitian terdahulu mengenai komisaris independen dengan penghindaran pajak dilakukan oleh Winata (2014) menemukan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian yang dilakukan Wijayanti, Anita dan Chomsatu (2016) yang menunjukkan hal yang berbeda bahwa komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Keberadaan komite audit dalam suatu perusahaan juga terbukti efektif dalam mencegah praktik penghindaran pajak. Menurut Andriyani (2008), komite audit bertugas untuk melakukan kontrol dalam proses penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk menghindari kecurangan pihak manajemen. Dalam teori agensi menyatakan bahwa, komite audit bertugas untuk melakukan kontrol dalam proses penyusunan laporan keuangan untuk menghindari kecurangan pihak manajemen terutama dalam menentukan manajemen pajak. Hal tersebut dapat mempengaruhi manajer agar tidak melakukan tindakan agresivitas penghindaran pajak.

Penelitian terdahulu mengenai komite audit dengan penghindaran pajak dilakukan oleh Cahyono, Andini dan Raharjo (2016) menemukan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan Annisa dan Kurniasih (2012) juga menyatakan bahwa komite audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian yang dilakukan Wijayanti, Anita dan Chomsatu (2016) menunjukkan hasil yang berbeda bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kebijakan yang diambil oleh perusahaan juga memiliki peran terhadap tingkat penghindaran pajak seperti dalam menentukan pembiayaan perusahaan dalam bentuk

utang atau *leverage*. Teori *debt covenant* menyatakan bahwa semakin tinggi rasio hutang atau ekuitas perusahaan semakin besar kemungkinan bagi manajer untuk memilih metode akuntansi yang dapat menaikkan laba. Menurut Singly dan Sukartha (2015), perusahaan dengan jumlah utang yang tinggi akan memiliki tarif pajak efektif yang baik. Hal ini dikarenakan dalam teori *debt covenant*, perusahaan dengan tingkat *Leverage* yang tinggi tidak akan agresif dalam hal perpajakan karena perusahaan harus mempertahankan laba mereka karena terikat dengan kepentingan kreditur. Apabila perusahaan berusaha meningkatkan laba, maka beban pajak yang dibayarkan juga akan meningkat (Adisamartha dan Noviani, 2015).

Menurut Aditama (2016) *leverage* merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan dalam menggunakan utang dalam pembiayaan. Menurut Kurniasih dan Sari (2013) *leverage* adalah rasio yang mengukur kemampuan hutang baik jangka panjang maupun jangka pendek untuk membiayai aktiva perusahaan. Apabila perusahaan memiliki sumber dana pinjaman tinggi, maka perusahaan akan berupaya untuk meningkatkan laba. Perusahaan dapat menggunakan tingkat *leverage* untuk meningkatkan laba dan akan berpengaruh terhadap meningkatnya beban pajak (Adisamartha dan Noviani, 2015).

Penelitian terdahulu mengenai *leverage* dengan penghindaran pajak dilakukan oleh Singly dan Sukartha (2015) menemukan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sejalan dengan penelitian dari Singly dan Sukartha (2015), hasil penelitian yang dilakukan Aditama (2016) yang menunjukkan bahwa *leverage* memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran

pajak. Penelitian yang dilakukan Darmawan dan Sukartha (2014) berbeda yaitu *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pengungkapan Pertanggungjawaban Sosial, Tata Kelola Perusahaan dan *Leverage* terhadap Agresivitas Penghindaran Pajak”**. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI untuk tahun 2015-2016. Perusahaan manufaktur dipilih karena perusahaan manufaktur menjadi penyumbang pajak terbesar sejak tahun 2013 (ekonomi.kompas.com). Namun, masih terdapat beberapa perusahaan manufaktur yang berupaya melakukan penghindaran pajak bahkan cenderung melakukan penggelapan pajak. Dalam penelitian ini, proksi yang digunakan yaitu proksi ETR (*Effective Tax Rates*) dalam mengukur penghindaran pajak. ETR dipilih karena mampu menggambarkan penghindaran pajak dari pajak kini dan pajak tangguhan. Oleh sebab itu, penelitian ini ingin lebih membuktikan apakah pertanggungjawaban sosial, kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit dan *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas penghindaran pajak perusahaan manufaktur di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah pengungkapan pertanggungjawaban sosial berpengaruh negatif terhadap agresivitas penghindaran pajak perusahaan?

2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap agresivitas penghindaran pajak perusahaan?
3. Apakah komisaris independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas penghindaran pajak perusahaan?
4. Apakah komite audit berpengaruh negatif terhadap agresivitas penghindaran pajak perusahaan?
5. Apakah *leverage* berpengaruh negatif terhadap agresivitas penghindaran pajak perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

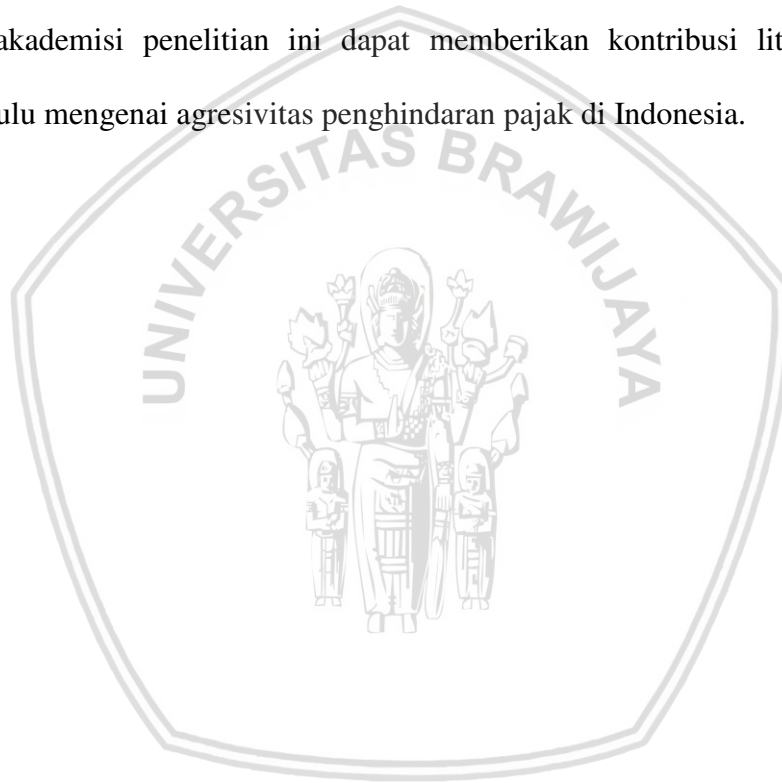
Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh pengungkapan pertanggungjawaban sosial terhadap agresivitas penghindaran pajak perusahaan.
2. Mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap agresivitas penghindaran pajak perusahaan.
3. Mengetahui pengaruh komisaris independen terhadap agresivitas penghindaran pajak perusahaan.
4. Mengetahui pengaruh komite audit terhadap agresivitas penghindaran pajak perusahaan.
5. Mengetahui pengaruh *leverage* terhadap agresivitas penghindaran pajak perusahaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi perusahaan penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dalam mempertimbangkan manajemen perpajakan.
2. Bagi penelitian yang akan datang sebagai acuan terutama penelitian yang berkaitan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak agresif.
3. Bagi akademisi penelitian ini dapat memberikan kontribusi literatur-literatur terdahulu mengenai agresivitas penghindaran pajak di Indonesia.





BAB II

TELAHAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Telaah Pustaka

2.1.1 Teori Legitimasi

Teori legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat (*society*), pemerintah, individu, dan kelompok masyarakat (Gray *et al.*, 1996). Hal ini mengindikasikan bahwa teori tersebut menjelaskan adanya kontrak sosial perusahaan terhadap masyarakat dan pengungkapan lingkungan. Teori legitimasi telah digunakan dalam kajian akuntansi untuk mengembangkan teori pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Dowling dan Pfeffer (1975) dalam Lanis dan Richardson (2013) menyatakan bahwa terdapat dua dimensi agar perusahaan memperoleh dukungan legitimasi, yaitu: (1) aktivitas organisasi perusahaan harus sesuai (*congruence*) dengan sistem nilai di masyarakat; (2) pelaporan aktivitas perusahaan juga hendaknya mencerminkan nilai sosial. Lindblom (1994) menyarankan bahwa suatu perusahaan dapat mengungkapkan pertanggungjawaban sosial untuk memperlihatkan perhatian manajemen terhadap nilai-nilai masyarakat dari pengaruh negatif aktivitas perusahaan. Dengan demikian, legitimasi memiliki manfaat untuk mendukung keberlangsungan hidup perusahaan (*going concern*).

Pada dasarnya keberlangsungan hidup perusahaan tergantung pada legitimasi (pengakuan) dari masyarakat sekitarnya. Cara mendapatkan legitimasi perusahaan salah satunya dengan melakukan pertanggungjawaban sosial. Ketika perusahaan

melakukan pertanggungjawaban sosial maka perusahaan tersebut akan mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat. Perusahaan tersebut akan memiliki keterbatasan untuk melakukan kecurangan seperti penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan sedikit saja perusahaan melakukan kecurangan maka masyarakat akan mengetahui dan mengubah pandangannya terhadap perusahaan dan akan mengancam keberlangsungan hidup perusahaan.

Ketika perusahaan melakukan kegiatan pertanggungjawaban sosial dan menyajikan pengungkapan pertanggungjawaban sosial maka legitimasi (pengakuan) dan kepercayaan dari masyarakat akan meningkat. Hal ini dikarenakan perusahaan yang melakukan pengungkapan pertanggungjawaban sosial akan lebih dekat dengan masyarakat yang menyebabkan adanya sorotan lebih dari masyarakat akan perusahaan tersebut. Contohnya terdapat pada indikator masyarakat, tentunya perusahaan-perusahaan yang menjalankan pengungkapan pertanggungjawaban sosial indikator masyarakat akan lebih dipandang oleh masyarakat dibanding yang tidak menjalankan. Masyarakat akan lebih peka terhadap perusahaan yang melakukan pertanggungjawaban sosial dibanding perusahaan yang tidak melakukan pertanggungjawaban sosial. Hal ini akan menyebabkan perusahaan akan memiliki keterbatasan untuk melakukan kecurangan karena adanya sorotan lebih dari masyarakat. Salah satu kecurangan yang mungkin dapat dilakukan oleh perusahaan adalah agresivitas penghindaran pajak. Sedikit saja perusahaan melakukan kecurangan, masyarakat akan mengetahuinya dan akan mengancam keberlangsungan hidup perusahaan. Maka diharapkan perusahaan yang melakukan aktivitas

pertanggungjawaban sosial dan menyajikan pengungkapan pertanggungjawaban sosial akan meminimalisasikan tindakan penghindaran pajak agar tetap mendapatkan pengakuan dari masyarakat.

2.1.2 Teori *Debt Covenant*

Dalam teori ini menyatakan bahwa semakin tinggi rasio hutang atau ekuitas perusahaan semakin besar kemungkinan bagi manajer untuk memilih metode akuntansi yang dapat menaikkan laba. Semakin tinggi rasio hutang atau ekuitas semakin dekat perusahaan dengan batas perjanjian atau peraturan kredit. Semakin tinggi batasan kredit semakin besar kemungkinan penyimpangan perjanjian kredit dan pengeluaran biaya. Manajer akan memiliki metode akuntansi yang dapat menaikkan laba sehingga dapat mengendurkan batasan kredit dan mengurangi biaya kesalahan teknis (Deegan, 2004:237).

Teori ini berkaitan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi perusahaan di dalam perjanjian utang (*debt covenant*). Sebagian perjanjian, utang mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi peminjam selama masa perjanjian. Pelanggaran terhadap perjanjian utang (*debt covenant*) dapat menimbulkan suatu biaya serta dapat menghambat kinerja manajemen. Sehingga dengan meningkatkan laba, perusahaan berusaha untuk mencegah atau setidaknya menunda hal tersebut (Watts dan Zimmerman, 1986:208 dalam Gumanti, 2002).

Perusahaan dengan jumlah utang yang tinggi akan memiliki tarif pajak efektif yang baik. Hal ini dikarenakan dalam teori *debt covenant*, perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi tidak akan agresif dalam hal perpajakan karena perusahaan

harus berupaya untuk tidak melakukan kecurangan-kecurangan salah satunya dengan melakukan agresivitas penghindaran pajak. Hal tersebut dikarenakan perusahaan terikat dengan perjanjian utang dengan kreditur. Perusahaan dengan *leverage* yang tinggi berarti memiliki kepercayaan lebih dari kreditur dan perusahaan tersebut akan lebih diawasi oleh kreditur. Kreditur akan percaya terhadap suatu perusahaan apabila perusahaan dapat dikatakan sehat dan bersih seperti tidak memiliki konflik, tidak memiliki tanggungan, tidak melakukan kecurangan dan terbebas dari sengketa hukum. Adanya perjanjian utang antara perusahaan dan kreditur akan menjamin perusahaan untuk tetap sehat dan bersih agar dapat membayar utang perusahaan dan kreditur tetap percaya atas perusahaan tersebut. Hal tersebut akan menyebabkan perusahaan akan memiliki keterbatasan melakukan kecurangan karena adanya pengawasan lebih dari kreditur salah satu kecurangan yang dapat terjadi adalah penghindaran pajak. Maka diharapkan perusahaan dengan *leverage* yang tinggi akan meminimalisasikan tindakan penghindaran pajak agar tetap mendapatkan kepercayaan dari kreditur.

2.1.3 Teori Agensi

Menurut Jensen dan Meckling (1976) hubungan agensi terjadi apabila adanya kontrak antara satu atau lebih pemberi kerja (*principal*) memberi kerjaan kepada orang lain sebagai *agent* untuk melakukan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan ke *agent*. Menurut Hendriksen dan Breda (1992) dalam Kurniasih dan Sari (2013), teori agensi merupakan hubungan kontrak antara manajemen suatu usaha yang disebut *agent* dan pemilik usaha yang disebut *principal*.

Dalam konteks perusahaan *go public*, *agent* merupakan manajemen yang bertugas untuk mengelola perusahaan, sedangkan *principal* merupakan pemegang saham atau investor. Dalam teori agensi tanggung jawab dan wewenang *principal* dan *agent* diatur dalam kontrak kerja atas persetujuan bersama. Agen akan melakukan tugas-tugas tertentu untuk prinsipal dan prinsipal harus memberikan agen imbalan sesuai dengan kontrak.

Ujiyantho dan Pramuka (2007) menjelaskan bahwa terdapat tiga asumsi sifat manusia dalam teori keagenan, yaitu: (1) manusia pada umumnya lebih mementingkan dirinya sendiri (*self interest*), (2) terbatasnya daya pikir manusia mengenai persepsi di masa yang akan datang (*bounded rationality*), dan (3) manusia selalu menghindari risiko (*risk adverse*). Dari penjelasan terkait asumsi sifat dasar manusia tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa manusia akan bertindak oportunistik dan selalu mengutamakan kepentingan pribadinya. Hal tersebut merupakan faktor penyebab timbulnya konflik keagenan antara manajer (*agent*) dan pemegang saham (*principal*).

Semakin baiknya tata kelola dalam suatu perusahaan maka hubungan antara *principal* dan manajer juga akan semakin baik. Tata kelola perusahaan dapat meminimalkan konflik keagenan yang terjadi antara *principal* dan agen (manajer). Konflik yang mungkin terjadi antara prinsipal dan agen yaitu konflik kepentingan. Dalam hal ini manajer akan bertindak oportunistik dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya untuk dirinya berupa bonus maupun insentif atas hasil kerjanya dalam menjalankan perusahaan tanpa mempertimbangkan risiko dan

kerugian yang ada. Sementara prinsipal mengharapkan agen dapat bertindak sesuai dengan keinginan dan kepentingannya yaitu agar perusahaan tetap baik dimata publik. Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan sering terjadinya konflik kepentingan antara prinsipal dan manajer. Dalam teori agensi tata kelola perusahaan yang baik dapat memainkan peran yang penting dalam memantau, mendisiplinkan, dan mempengaruhi manajer dan memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk berperilaku mementingkan diri sendiri. Hal tersebut membuat manajer tidak dapat berperilaku mementingkan diri sendiri dan diharapkan manajer akan meminimalisasi tindakan penghindaran pajak karena principal akan berupaya untuk mengawasi kegiatan manajer. Termasuk dalam hal melakukan manajemen pajak.

2.1.4 Penghindaran Pajak

Menurut Suandy (2015:6) penghindaran pajak merupakan perencanaan pajak yang tujuannya untuk merekayasa agar beban pajak perusahaan dapat serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuat undang-undang. Penghindaran pajak bukan merupakan pelanggaran undang-undang perpajakan karena usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimalkan, dan meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh undang-undang. Menurut Mangonting (1999) penghindaran pajak dilakukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan karena penghindaran pajak yang dilakukan lebih memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan berbeda dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang

mengacu pada penghindaran pajak dengan cara ilegal misalnya melaporkan pendapatan dibawah yang sebenarnya ataupun tingkat pengurangan yang tinggi.

Penghindaran pajak merupakan suatu upaya meminimalisasi beban pajak bagi perusahaan dengan cara yang legal dikarenakan adanya ketidaksempurnaan dalam Undang-Undang Perpajakan (Kurniasih dan Sari, 2013). Penghindaran pajak merupakan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi atau menghapus hutang pajak yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan (Zain, 2008:49)

Menurut Sumarsan (2015:116) penghindaran pajak adalah wajib pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang sekalipun kadang-kadang dengan jelas menafsirkan undang-undang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pembuat undang-undang. Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu sebagai berikut:

1. Menahan diri, yaitu perusahaan sebagai wajib pajak tidak melakukan sesuatu yang bisa dikenai pajak.
2. Lokasi terpencil, yaitu perusahaan sebagai wajib pajak akan memindahkan lokasi usaha atau domisili dari lokasi yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah.
3. Penghindaran pajak secara yuridis, yaitu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga perbuatan-perbuatan yang dilakukan tidak terkena pajak. Biasanya dilakukan dengan memanfaatkan kekosongan atau ketidakjelasan undang-undang.

Dalam Lanis dan Richardson (2012) usaha penghindaran pajak berlebih disebut dengan agresivitas pengindaran pajak. Agresivitas penghindaran pajak yaitu adanya usaha lebih dari suatu perusahaan untuk meminimalkan beban pajak dengan tujuan untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Agresivitas penghindaran pajak dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan kelemahan-kelemahan ketentuan perpajakan yang ada. Semakin lemahnya peraturan yang mendukung pengenaan pajak maka semakin agresif usaha perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Jessica dan Toli (2014) menyimpulkan bahwa agresivitas penghindaran pajak termasuk dalam tindakan legal dalam upaya untuk mengurangi pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Perbedaan antara penghindaran pajak dengan agresivitas penghindaran pajak terdapat pada kegiatan transaksi yang dilakukan perusahaan. Kegiatan agresivitas penghindaran pajak merupakan kegiatan perencanaan untuk mengurangi pajak terhutang yang dilakukan dengan lebih agresif. Kegiatan transaksi agresif yang dilakukan perusahaan untuk penghindaran pajak adalah dengan cara melakukan transaksi yang dibuat tidak ada tujuan bisnisnya, berusaha untuk mendapatkan fasilitas bisnis dan melakukan transaksi yang bukan merupakan objek pajak.

Penghindaran pajak suatu perusahaan dapat diukur dengan berbagai cara. Menurut Sari dan Martani (2010) cara mengukur agresivitas pajak dapat menggunakan *effective tax rate*, *cash effective tax rate*, *book-tax difference*, *current tax effective tax rate* dan sebagainya. *Effective Tax Rate* (ETR) adalah tarif pajak aktual yang harus dibayarkan oleh perusahaan dibandingkan laba yang dihasilkan

oleh perusahaan. ETR memiliki kelebihan yaitu mampu menggambarkan penghindaran pajak yang berasal dari pajak kini dan pajak tangguhan. *Cash effective tax rate (CashETR)* merupakan pembayaran pajak secara kas atas laba perusahaan sebelum pajak penghasilan. *CashETR* memiliki kelebihan yaitu menggambarkan penghindaran pajak karena tidak terpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti penyisihan penilaian atau perlindungan pajak namun, *Cash ETR* memiliki kekurangan yaitu tidak menggambarkan pajak yang akan dibayarkan perusahaan pada tahun mendatang. *Book tax difference (BTD)* merupakan gambaran selisih antara laba akuntansi dan laba fiskal. Kelebihan yang dimiliki oleh BTD adalah BTD dapat menggambarkan selisih antara laba akuntansi dengan laba fiskal, dimana ketika terdapat perbedaan besar antara laba akuntansi dengan penghasilan kena pajak di perusahaan umumnya menunjukkan perilaku agresif terhadap pajak yang lebih besar. Kekurangan yang dimiliki BTD adalah dapat dipengaruhi oleh estimasi-estimasi akuntansi sehingga timbul perbedaan sementara antara komersial dan fiskal. *Current effective tax rate (CuETR)* merupakan *effective tax rate* berdasarkan jumlah pajak penghasilan badan yang dibayarkan pada tahun berjalan. Kelebihan yang dimiliki oleh CuETR adalah dapat mengakomodasikan pajak yang dibayarkan oleh perusahaan sehingga dapat mengukur tax avoidance dalam jangka pendek namun, kekurangannya adalah CuETR hanya menggambarkan pajak yang dibayarkan pada tahun berjalan dan tidak menggambarkan pajak yang akan dibayarkan perusahaan di masa depan.

Penelitian ini menggunakan proksi ETR sebagai proksi penghindaran pajak karena penggunaan ETR diharapkan mampu memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai beban pajak yang akan berdampak pada laba akuntansi yang dapat dilihat dalam catatan atas laporan keuangan perusahaan (Astuti & Aryani, 2016). ETR telah memperhitungkan beban pajak tahun berjalan dan pajak tangguhan perusahaan. Koreksi fiskal yang menjadi indikasi dilakukannya penghindaran pajak oleh manajemen terdapat dalam penghasilan kena pajak tahun berjalan dan pajak tangguhan perusahaan. ETR dianggap dapat mengukur agresivitas penghindaran pajak, karena perusahaan-perusahaan yang menghindari pajak perusahaan dengan mengurangi penghasilan kena pajak mereka dengan tetap menjaga laba akuntansi keuangan. Penghindaran pajak suatu perusahaan dapat diukur dengan *effective tax rate*.

$$ETR = \frac{\text{Beban pajak penghasilan}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

2.1.5 Pertanggungjawaban Sosial

Menurut Suparno (2010) pertanggungjawaban sosial merupakan tanggung jawab moral perusahaan terhadap masyarakat. Tanggung jawab moral perusahaan tentu bisa diarahkan kepada banyak hal seperti, kepada pemodal, kepada karyawan perusahaan, kepada perusahaan lain, pemasok, konsumen, penyalur, media massa, masyarakat sekitar, pemerintah, dan lain-lain.

Definisi pertanggungjawaban sosial yang dikemukakan oleh *World Bank* dalam Wibisono (2007:7) yang memandang bahwa pertanggungjawaban sosial dapat

dijelaskan sebagai suatu komitmen perusahaan dalam berkontribusi terhadap bekerjanya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan karyawan dan perwakilan mereka agar dapat meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat setempat maupun masyarakat secara. Kontribusi tersebut harus dilakukan dengan cara yang baik dimana baik untuk dunia usaha dan juga untuk pembangunan. Implementasi pertanggungjawaban sosial dapat menjadi wujud komitmen yang dilakukan oleh perusahaan untuk memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas kehidupan.

Darwin (2004), mengungkapkan bahwa pertanggungjawaban sosial adalah cara sukarela yang dapat dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mengintegrasikan perhatian lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan *stakeholders*, yang melebihi tanggung jawab perusahaan di bidang hukum.

Pengungkapan pertanggungjawaban sosial merupakan suatu kewajiban bagi setiap perusahaan yang diatur oleh pemerintah dalam Undang-Undang RI No. 47 tahun 2012 tentang “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”. Dalam pasal 2 Undang-Undang RI No. 47 tahun 2012 menyebutkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan harus dilakukan oleh setiap perseroan selaku subjek hukum. Diperjelas dalam pasal 3, perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam akan memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial baik di dalam maupun di luar lingkungan perseroan berdasarkan Undang-Undang.

Menurut Deegan (2002), menyatakan bahwa pengungkapan pertanggungjawaban sosial dapat dijadikan sebagai sarana yang digunakan oleh

manajemen perusahaan dalam berinteraksi dengan masyarakat yang lebih luas untuk mempengaruhi persepsi. Pengungkapan pertanggungjawaban sosial terdapat laporan tanggung jawab sosial perusahaan, laporan sumber daya manusia, dan laporan kesehatan dan keselamatan kerja. Menurut Grey *et al*, (1987) dalam Lanis dan Richardson (2012) menyatakan bahwa pengungkapan pertanggungjawaban sosial adalah proses pemberian informasi yang dirancang untuk melepaskan akuntabilitas sosial.

Sedangkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 paragraf keempat belas menyatakan bahwa entitas dapat pula menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya bagi industri dimana faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap karyawan sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peran penting. Laporan tambahan tersebut di luar ruang lingkup Standar Akuntansi Keuangan.

Ketentuan mengenai pengungkapan pertanggungjawaban sosial di Indonesia sampai saat ini belum terdapat standar khusus, namun menurut peraturan BAPEPAM No VIII.G.2 terdapat 78 item pengungkapan yang sesuai dengan kondisi di Indonesia. Item tersebut terdiri atas 7 kategori yang terdiri dari 13 item kategori lingkungan, 7 item kategori energi, 8 item kategori kesehatan dan keselamatan tenaga kerja, 29 item kategori lain-lain tenaga kerja, 10 item kategori produk, 9 item kategori keterlibatan masyarakat, dan 2 item kategori umum. Rumus untuk menghitung Indeks pertanggungjawaban sosial sebagai berikut:

$$TCSR_{li} = \frac{\sum X_{yi}}{N_i}$$

- TCSR_{li} : Indeks luas pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan
 $\sum X_{yi}$: Nilai 1 = jika item y diungkapkan; 0 = jika item y tidak diungkapkan
 N_i : Jumlah item untuk perusahaan i

Menurut Wibisono (2007) menyatakan bahwa terdapat 10 keuntungan yang dapat diperoleh dalam melakukan pertanggungjawaban sosial, yaitu: mempertahankan dan mendongkrak reputasi dan *image* perusahaan, layak mendapatkan *social license to operate*, mereduksi resiko bisnis perusahaan, melebarkan akses sumber daya, membentangkan akses menuju market, mereduksi biaya, memperbaiki hubungan dengan *stakeholder*, memperbaiki hubungan dengan regulator (pemerintah), meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan, peluang mendapatkan penghargaan.

2.1.6 Tata Kelola Perusahaan

Menurut Desai dan Dharmapala (2007) definisi dari tata kelola perusahaan atau *Good Corporate Governance* adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stockholder*. *Corporate governance* menurut FCGI (*Forum for Corporate Governance*) (2001) mempergunakan definisi *Cadbury Committee*, yaitu seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan

kata lain sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Di samping itu FCGI juga menjelaskan, bahwa tujuan dari *Corporate Governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).

Corporate Governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kerja perusahaan (Annisa & Kurniasih, 2012). Menurut Sulistyanto dan Lidyah (2002) salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar adalah *Good Corporate Governance*. *Corporate Governance* berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara. Jika diterapkan *Corporate Governance* akan mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif.

Prinsip *Corporate Governance* di Indonesia menurut Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tentang penerapan praktik *Good Corporate* pada BUMN pada Bab II pasal 3 meliputi lima prinsip yaitu:

1. Transparansi (*transparency*), yaitu adanya keterbukaan dalam proses pelaksanaan pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi-informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.
2. Kemandirian (*independency*), yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak maupun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

3. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
4. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. Kewajaran (*fairness*), yaitu kadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Kurniasih dan Sari (2013) *Good Corporate Governance* menunjukkan perbedaan kepentingan antara manajer dan pemilik suatu perusahaan yang berkaitan dengan keadaan baik-buruknya tata kelola suatu perusahaan dengan tindakan pengambilan keputusan perpajakannya. Mekanisme *Good Corporate Governance* ditandai dengan adanya kepemilikan institusional, keberadaan komite audit, dan komisaris independen.

Kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan dapat membatasi perilaku manajer dalam melakukan penghindaran pajak. Menurut dalam Indahningrum dan Handayani (2009) menyatakan bahwa adanya pemegang saham besar seperti kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen dengan pengawasan yang lebih optimal. Wahidahwati (2002) menyatakan bahwa kepemilikan institusional merupakan persentase saham yang dimiliki oleh pihak institusi perusahaan pada akhir tahun. Semakin besar kepemilikan institusional maka

semakin besar pengawasan yang dilakukan oleh pihak eksternal. Manajemen perusahaan akan melakukan kebijakan guna mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga kinerja perusahaan akan meningkat. Pemegang saham eksternal mempunyai insentif untuk memonitor dan mempengaruhi manajemen secara wajar untuk melindungi investasi mereka dalam perusahaan. Pemegang saham eksternal mengurangi perilaku manajer yang oportunistik, sehingga mengakibatkan rendahnya konflik agensi langsung antara manajemen dan pemegang saham.

Menurut Ngadiman dan Sari (2014), kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dan dana perwalian serta institusi lainnya. Institusi-institusi tersebut memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan atas kinerja manajemen.

Menurut Sari dan Martani (2010), komisaris independen dalam suatu perusahaan dapat memberi bukti efektif dalam pengambilan keputusan perpajakan perusahaan, terutama pada prinsip transparansi. Dengan adanya keterbukaan informasi diharapkan perusahaan akan cenderung mengambil tindakan perpajakan yang tidak berisiko dengan tidak melakukan penghindaran pajak.

Menurut Boediono (2005) dalam menjalankan fungsi pengawasan, dewan komisaris dapat mempengaruhi pihak manajemen untuk menyusun laporan keuangan berkualitas. Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat

mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan.

Keberadaan komite audit dalam suatu perusahaan juga terbukti efektif dalam mencegah praktik penghindaran pajak. Menurut Andriyani (2008), komite audit bertugas untuk melakukan kontrol dalam proses penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk menghindari kecurangan pihak manajemen.

Pohan (2008) menyebutkan sejak direkomendasi *corporate governance* di Bursa Efek Indonesia tahun 2000, komite audit telah menjadi komponen umum dalam struktur *corporate governance* perusahaan publik. Komite ini berfungsi sebagai pengawasan internal, karena BEI mengharuskan semua emiten untuk membentuk dan memiliki komite audit yang diketuai oleh komisaris independen. Komite audit yang beranggotakan sedikit, cenderung dapat bertindak lebih efisien, namun juga memiliki kelemahan, yakni minimnya ragam pengalaman anggota, sehingga anggota komite audit seharusnya memiliki pemahaman memadai tentang pembuatan laporan keuangan dan prinsip-prinsip pengawasan internal. Menurut Kurniasih dan Sari (2013) komite audit dapat diukur dengan mencatat jumlah komite audit pada suatu perusahaan.

2.1.7 Leverage

Jessica dan Toli (2014) mendefinisikan bahwa *leverage* sebagai rasio yang timbul apabila dalam kegiatan operasionalnya perusahaan menggunakan dana pinjaman atau menggunakan dana yang memiliki beban bunga. Menurut Kurniasih dan Sari (2013) *leverage* adalah rasio yang mengukur kemampuan utang baik jangka

panjang maupun jangka pendek untuk membiayai aktiva perusahaan. Menurut Aditama (2016) *leverage* merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan dalam menggunakan utang dalam pembiayaan. *Leverage* ini menjadi sumber pendanaan perusahaan dari eksternal dari utang. Utang yang dimaksud adalah utang jangka panjang dan utang jangka pendek perusahaan. Beban bunga secara jangka panjang maupun jangka pendek akan mengurangi beban pajak yang ada.

Apabila perusahaan memiliki sumber dana pinjaman tinggi, maka perusahaan akan membayar beban bunga tinggi kepada kreditur. Beban bunga akan mengurangi laba, sehingga dengan berkurangnya laba maka mengurangi beban pajak dalam satu periode berjalan. Perusahaan dapat menggunakan tingkat *leverage* untuk mengurangi laba dan akan berpengaruh terhadap berkurangnya beban pajak (Adisamartha dan Noviani, 2015).

Pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa *leverage* dapat mencerminkan mengenai struktur modal yang dimiliki perusahaan. Selain itu, *leverage* juga mencerminkan mengenai struktur modal yang dimiliki perusahaan. Menurut Kurniasih dan Sari (2013) *levrage* dapat dihitung dengan total utang baik jangka pendek maupun jangka panjang dengan total *debt to equity ratio* dengan rumus sebagai berikut:

$$Lev = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Equity}}$$

2.2 Pengembangan Hipotesis

2.2.1 Pertanggungjawaban sosial terhadap Agresivitas Penghindaran Pajak

Pertanggungjawaban sosial adalah cara sukarela yang dapat dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mengintegrasikan perhatian lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan *stakeholders*, yang melebihi tanggung jawab perusahaan di bidang hukum. Dalam teori legitimasi dinyatakan bahwa sistem nilai perusahaan sejalan dengan sistem nilai dari sistem sosial yang lebih besar dimana perusahaan merupakan bagiannya. Sistem nilai sosial perusahaan ini ditunjukkan dari kepatuhan perusahaan membayar pajak dan tidak berupaya untuk melakukan kegiatan penghindaran pajak yang dapat merugikan banyak pihak terutama masyarakat.

Pada dasarnya keberlangsungan hidup perusahaan tergantung pada legitimasi (pengakuan) dari masyarakat sekitarnya. Cara mendapatkan legitimasi perusahaan salah satunya dengan melakukan pertanggungjawaban sosial. Karena ketika perusahaan melakukan kegiatan pertanggungjawaban sosial dan menyajikan pengungkapan pertanggungjawaban sosial maka legitimasi (pengakuan) dan kepercayaan dari masyarakat akan meningkat dan akan berdampak pada keberlangsungan hidup perusahaan. Hal ini dikarenakan perusahaan yang melakukan pengungkapan pertanggungjawaban sosial akan lebih dekat dengan masyarakat yang menyebabkan adanya sorotan lebih dari masyarakat akan perusahaan tersebut. Contohnya terdapat pada indikator masyarakat, tentunya perusahaan-perusahaan yang menjalankan pengungkapan pertanggungjawaban sosial indikator masyarakat akan lebih dipandang oleh masyarakat dibanding yang tidak menjalankan. Masyarakat akan lebih peka terhadap perusahaan yang melakukan pertanggungjawaban sosial dibanding perusahaan yang tidak melakukan pertanggungjawaban sosial. Hal ini akan

menyebabkan perusahaan akan memiliki keterbatasan untuk melakukan kecurangan karena adanya sorotan lebih dari masyarakat. Salah satu kecurangan yang mungkin dapat dilakukan oleh perusahaan adalah agresivitas penghindaran pajak. Sedikit saja perusahaan melakukan kecurangan, masyarakat akan mengetahuinya dan akan mengancam keberlangsungan hidup perusahaan. Maka diharapkan perusahaan yang melakukan aktivitas pertanggungjawaban sosial dan menyajikan pengungkapan pertanggungjawaban sosial akan meminimalisasikan tindakan penghindaran pajak agar tetap mendapatkan pengakuan dari masyarakat. Lanis dan Richardson (2012) menyatakan bahwa perusahaan yang melakukan tindakan penghindaran pajak dinilai secara sosial tidak bertanggung jawab oleh publik.

Hasil penelitian terdahulu tentang pertanggungjawaban sosial terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh Lanis dan Richardson (2012) menunjukkan bahwa pertanggungjawaban sosial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Penelitian lain mengenai pertanggungjawaban sosial dengan penghindaran pajak dilakukan oleh Jessica dan Toli (2014), menemukan bahwa pertanggungjawaban sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Perusahaan yang rendah tingkat pengungkapan pertanggungjawaban sosial cenderung lebih agresif melakukan berbagai upaya agar dapat meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. Berdasarkan analisis dan temuan penelitian di atas, maka hipotesis penelitian ini

dirumuskan sebagai berikut:

H₁ : Pengungkapan pertanggungjawaban sosial berpengaruh negatif terhadap

agresivitas penghindaran pajak.

2.2.2 Kepemilikan Institutional terhadap Agresivitas Penghindaran Pajak

Salah satu mekanisme dari tata kelola perusahaan adalah kepemilikan institusional. Menurut Ngadiman dan Sari (2014), kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dan dana perwalian serta institusi lainnya. Institusi-institusi tersebut memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan atas kinerja manajemen.

Dalam teori agensi tata kelola perusahaan yang baik dapat memainkan peran yang penting dalam memantau, mendisiplinkan, dan mempengaruhi manajer dan memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk berperilaku mementingkan diri sendiri. Salah satu mekanisme dari tata kelola perusahaan yaitu kepemilikan institusional diharapkan mampu meminimalkan konflik kepentingan yang terjadi antara prinsipal dan manajer. Karena pemilik institusional dapat memainkan peran yang penting dalam memantau, mendisiplinkan, dan mempengaruhi manajer. Pemilik institusional berdasarkan besar dan hak suara yang dimiliki, dapat memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang manajer untuk berperilaku mementingkan diri sendiri. Hal tersebut membuat manajer tidak dapat berperilaku mementingkan diri sendiri dan diharapkan manajer akan meminimalisasi tindakan penghindaran pajak karena pemilik institusi akan berupaya untuk mengawasi kegiatan manajer. Termasuk dalam hal melakukan manajemen pajak.

Penelitian terdahulu tentang kepemilikan institusional dengan penghindaran pajak dilakukan oleh Ngadiman dan Puspitasari (2014), menemukan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Annisa dan Kurniasih (2012) yang menunjukkan bahwa pengaruh positif dan signifikan antara kepemilikan institusional dengan penghindaran pajak.

Ketika semakin besar saham yang dimiliki oleh pemilik institusi maka semakin besar pula peran yang dimiliki pemilik institusi dalam mempengaruhi manajer terutama dalam melakukan manajemen perpajakan. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak yang dilakukan manajer. Diharapkan pemilik institusi akan mempengaruhi manajer untuk tidak melakukan tindakan penghindaran pajak. Berdasarkan analisis dan temuan penelitian di atas, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H₂ : Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap agresivitas penghindaran pajak.

2.2.3 Komisaris Independen terhadap Agresivitas Penghindaran Pajak

Menurut Boediono (2005) dalam menjalankan fungsi pengawasan, komisaris independen dapat mempengaruhi pihak manajemen untuk menyusun laporan keuangan berkualitas. Komisaris Independen dapat melaksanakan fungsi *monitoring* untuk mendukung pengelolaan perusahaan yang baik dan menjadikan laporan keuangan lebih objektif. Komisaris independen bertujuan untuk menyeimbangkan

dalam pengambilan keputusan khususnya dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait. Dengan demikian keberadaan komisaris independen pada suatu perusahaan diharapkan dapat meningkatkan integritas laporan keuangan (Sari dan Martani, 2010).

Dalam teori agensi tata kelola perusahaan yang baik dapat memainkan peran yang penting dalam memantau, mendisiplinkan, dan mempengaruhi manajer dan memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk berperilaku mementingkan diri sendiri. Salah satu mekanisme dari tata kelola perusahaan yaitu komisaris independen diharapkan mampu meminimalkan konflik kepentingan yang terjadi antara prinsipal dan manajer. Karena dewan komisaris dapat mempengaruhi pengambilan keputusan perpajakan perusahaan, terutama pada prinsip transparansi. Dengan adanya keterbukaan informasi kepada komisaris independen diharapkan perusahaan akan cenderung mengambil tindakan perpajakan yang tidak berisiko dengan tidak melakukan penghindaran pajak. Hal tersebut membuat manajer tidak dapat berperilaku mementingkan diri sendiri dan diharapkan manajer akan meminimalisasi tindakan penghindaran pajak karena komisaris independen akan berupaya untuk mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh manajer. Termasuk dalam mengambil keputusan perpajakan.

Penelitian terdahulu tentang kepemilikan institusional dengan penghindaran pajak dilakukan oleh Ngadiman dan Puspitasari (2014), menemukan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Annisa dan Kurniasih (2012) yang menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kepemilikan institusional dengan penghindaran pajak.

Semakin besar jumlah komisaris independen dibandingkan dengan jumlah dewan komisaris perusahaan tersebut diharapkan akan meningkatkan fungsi pengawasan terhadap manajer perusahaan dalam hal manajemen perpajakan. Adanya fungsi pengawasan yang dimiliki komisaris independen diharapkan manajer perusahaan akan meminimalisasi tindakan penghindaran pajak. Berdasarkan analisis dan temuan penelitian di atas, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H₃ : Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas penghindaran pajak.

2.2.4 Komite Audit terhadap Agresivitas Penghindaran Pajak

Menurut andriyani (2008) dalam Kurniasih dan Sari (2013), komite audit bertugas untuk melakukan kontrol dalam proses penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk menghindari kecurangan pihak manajemen terutama dalam menentukan manajemen perpajakan. Pohan (2008) dalam penelitiannya memaparkan bahwa dewan komisaris wajib membentuk komite audit yang beranggotakan sekurang-kurangnya satu orang anggota, diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Berjalannya fungsi komite audit secara efektif memungkinkan pengendalian pada perusahaan dan laporan keuangan yang lebih baik serta mendukung *Good Corporate Governance*.

Dalam teori agensi tata kelola perusahaan yang baik dapat memainkan peran yang penting dalam memantau, mendisiplinkan, dan mempengaruhi manajer dan memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk berperilaku mementingkan diri sendiri. Salah satu mekanisme dari tata kelola perusahaan yaitu komite audit diharapkan mampu meminimalkan konflik kepentingan yang terjadi antara prinsipal dan manajer. Karena akan semakin banyak kontrol yang dilakukan untuk manajer. Hal tersebut membuat manajer akan lebih berhati-hati dan tidak dapat berperilaku mementingkan diri sendiri dalam membuat suatu keputusan manajemen. Termasuk dalam manajemen perpajakan. Diharapkan manajer akan meminimalisasi tindakan penghindaran pajak karena komite audit akan berupaya untuk mengontrol setiap kegiatan yang dilakukan oleh manajer.

Penelitian terdahulu mengenai komite audit dengan penghindaran pajak dilakukan oleh Cahyono, Andini dan Raharjo (2016) menemukan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan Annisa dan Kurniasih (2012) menyatakan bahwa komite audit memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian yang dilakukan Wijayanti, Anita dan Chomsatu (2016) menunjukkan hasil yang berbeda bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Semakin banyak jumlah komite audit dalam suatu perusahaan, maka akan semakin banyak kontrol yang dilakukan untuk pihak manajemen. Hal tersebut diharapkan dapat menghindari kecurangan pihak manajemen terutama dalam

menentukan manajemen perpajakan. Berdasarkan analisis dan temuan penelitian di atas, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H₄ : Komite audit berpengaruh negatif terhadap agresivitas penghindaran pajak.

2.2.5 *Leverage* terhadap Agresivitas Penghindaran Pajak

Leverage sebagai rasio yang timbul apabila dalam kegiatan operasionalnya perusahaan menggunakan dana pinjaman atau menggunakan dana yang memiliki beban bunga. Perusahaan menggunakan utang akan menimbulkan adanya bunga yang harus dibayar. Semakin tinggi *leverage* maka semakin tinggi pula resiko perusahaan, karena perusahaan harus membayar bunga utang yang tinggi menggunakan hasil usahanya, sehingga mempengaruhi laba bersih perusahaan.

Teori akuntansi positif dengan hipotesis *debt covenant* menjelaskan semakin tingginya hubungan perusahaan dengan pihak ketiga (kreditur) maka perusahaan akan lebih menjaga laba periode berjalan dengan tujuan untuk menjaga stabilitas kinerja perusahaan dengan kreditur maka kreditur akan lebih mengawasi perusahaan dengan alasan kelangsungan pinjaman modal eksternal (Adisamartha dan Noviari, 2015).

Perusahaan dengan *leverage* yang tinggi berarti memiliki kepercayaan lebih dari kreditur dan perusahaan tersebut akan lebih diawasi oleh kreditur. Kreditur akan percaya terhadap suatu perusahaan apabila perusahaan dapat dikatakan sehat dan bersih seperti tidak memiliki konflik, tidak memiliki tanggungan, tidak melakukan kecurangan dan terbebas dari sengketa hukum. Adanya perjanjian utang antara

perusahaan dan kreditur akan menjamin perusahaan untuk tetap sehat dan bersih agar dapat membayar utang perusahaan dan kreditur tetap percaya atas perusahaan tersebut. Hal tersebut akan menyebabkan perusahaan akan memiliki keterbatasan melakukan kecurangan karena adanya pengawasan lebih dari kreditur salah satu kecurangan yang dapat terjadi adalah penghindaran pajak. Maka diharapkan perusahaan dengan *leverage* yang tinggi akan meminimalisasikan tindakan penghindaran pajak agar tetap mendapatkan kepercayaan dari kreditur.

Penelitian terdahulu mengenai *leverage* dengan penghindaran pajak dilakukan oleh Swingly dan Sukartha (2015) menemukan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sejalan dengan penelitian dari Swingly dan Sukartha (2015), hasil penelitian yang dilakukan Aditama (2016) yang menunjukkan bahwa *leverage* memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan Darmawan dan Sukartha (2014) berbeda yaitu *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan analisis dan temuan penelitian di atas, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H₅ : *Leverage* berpengaruh negatif terhadap agresivitas penghindaran pajak.

2.3 Kerangka Teoritis

Penghindaran pajak merupakan suatu upaya meminimalisasi beban pajak bagi perusahaan dengan cara yang legal dikarenakan adanya ketidaksempurnaan dalam Undang-Undang Perpajakan (Kurniasih dan Sari, 2013). Menurut Mangonting (1999) penghindaran pajak dilakukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan karena penghindaran pajak yang dilakukan lebih memanfaatkan

celah-celah dalam undang-undang perpajakan berbeda dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang mengacu pada penghindaran pajak dengan cara ilegal misalnya melaporkan pendapatan dibawah yang sebenarnya ataupun tingkat pengurangan yang tinggi. Namun sebenarnya persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik. Di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan karena tidak melanggar peraturan tetapi di sisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan (Ngadiman dan Puspitasari, 2014).

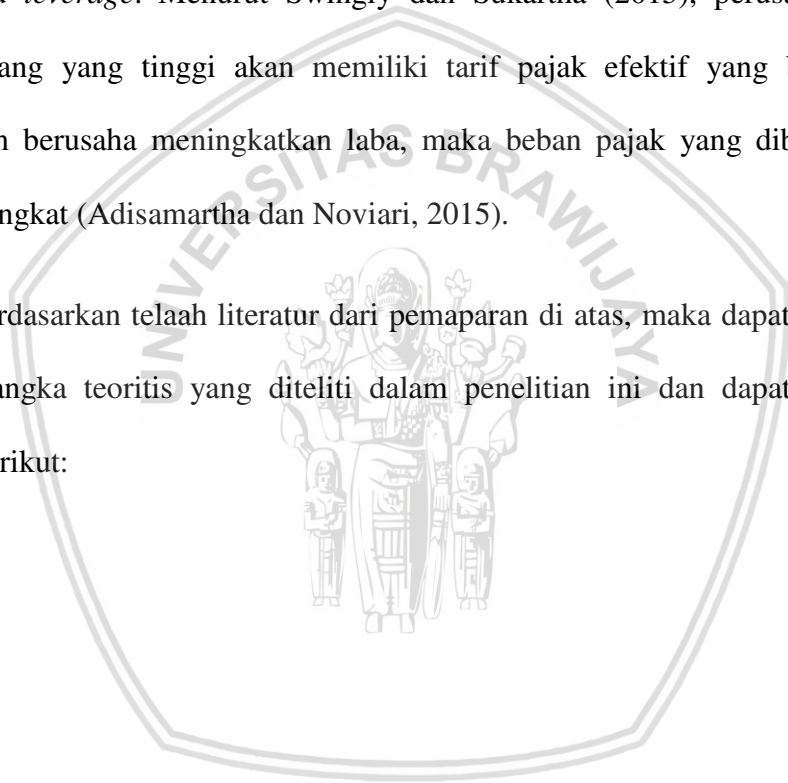
Menurut Lanis dan Richardson (2012) pajak yang dibayar perusahaan dengan seminimalnya merupakan tindakan yang tidak diharapkan oleh masyarakat karena pajak memiliki implikasi penting bagi pendanaan masyarakat. Pandangan masyarakat mengenai perusahaan yang melakukan tindakan penghindaran pajak dianggap membentuk suatu kegiatan yang tidak bertanggung jawab secara sosial dan tidak sah. Apalagi perusahaan juga diwajibkan melakukan tanggung jawab social. Hal ini berarti penghindaran pajak berdampak negatif bagi perusahaan karena tidak melakukan tanggung jawab sosial seperti apa yang diharapkan masyarakat.

Praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tidak dapat lepas dari teori agensi. Teori agensi membantu menjelaskan kecenderungan penghindaran pajak perusahaan. Penghindaran pajak perusahaan membuka peluang bagi manajer untuk bersikap oportunistik dengan melakukan penghindaran pajak untuk tujuan keuntungan jangka pendek. Penerapan *corporate governance* bertujuan untuk meminimumkan konflik keagenan. Mekanisme *Good Corporate Governance* ditandai dengan adanya

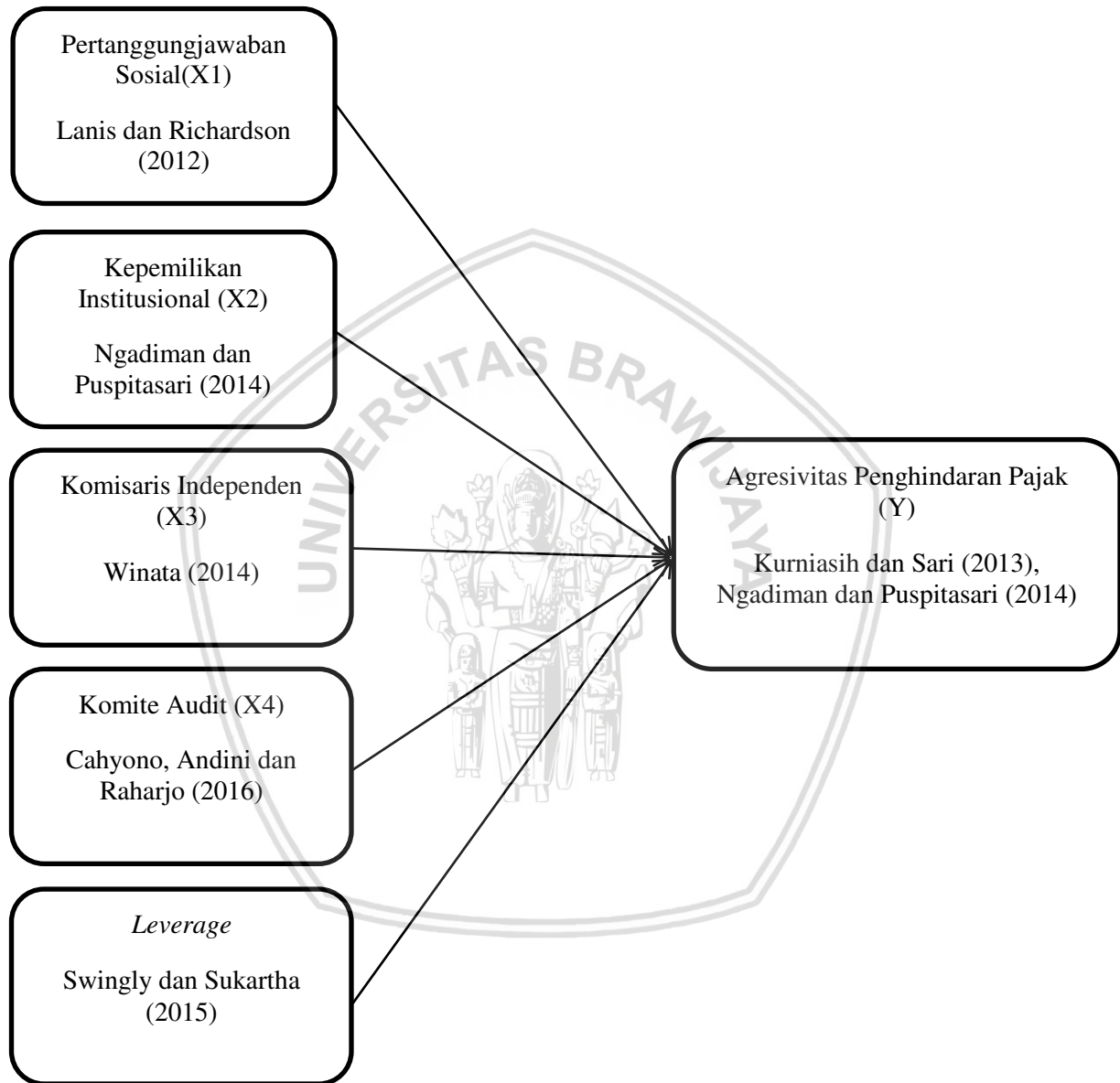
kepemilikan institusional (Ngadiman dan Puspitasari, 2014), komisaris independen (Winata, 2014) dan keberadaan komite audit (Cahyono, Andini dan Raharjo, 2016).

Kebijakan yang diambil oleh perusahaan juga memiliki peran terhadap tingkat penghindaran pajak seperti dalam menentukan pembiayaan perusahaan dalam bentuk utang atau *leverage*. Menurut Swingly dan Sukartha (2015), perusahaan dengan jumlah utang yang tinggi akan memiliki tarif pajak efektif yang baik. Apabila perusahaan berusaha meningkatkan laba, maka beban pajak yang dibayarkan juga akan meningkat (Adisamartha dan Noviari, 2015).

Berdasarkan telaah literatur dari pemaparan di atas, maka dapat digambarkan suatu kerangka teoritis yang diteliti dalam penelitian ini dan dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Teoritis



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2010:14), penelitian kuantitatif adalah penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu dengan pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian dan analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdatar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2016. Perusahaan manufaktur dipilih dengan pertimbangan agar data yang didapatkan homogen sehingga menggambarkan kekhususan hasil pada satu jenis perusahaan. Perusahaan manufaktur juga dipilih karena penyumbang pajak terbesar.

Metode pengambilan sampel yang diambil dari populasi perusahaan menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* digunakan dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Pengambilan sampel menggunakan kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Melaporkan laporan tahunan secara lengkap dan berturut-turut dari tahun 2015-2016 di IDX.
2. Memiliki laporan keuangan menggunakan satuan mata uang Rupiah.

3. Memiliki pengungkapan pertanggungjawaban sosial dalam laporan tahunan.
4. Laporan tahunan menyajikan data kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit.
5. Perusahaan tidak mengalami kerugian selama periode penelitian.

3.3 Data Penelitian dan Sumber Data

3.3.1 Jenis dan Sumber Data

Data sekunder diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, yang didokumentasikan dalam www.idx.co.id. Data-data yang dibutuhkan antara lain data yang menyajikan laporan keuangan secara lengkap, menyajikan laporan CSR, dan menyajikan data kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit. Data ini diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Informasi penerapan tata kelola perusahaan berdasarkan peraturan BAPEPAM No VIII.G.2 yang bisa didapat dengan melakukan skoring atas laporan tahunan (*annual report*).
2. Data keuangan yang dibutuhkan dalam perhitungan variabel dalam penelitian ini yang meliputi: beban pajak penghasilan, laba sebelum pajak, total hutang jangka panjang, dan total aset.
3. Data mekanisme *good corporate governance* yang meliputi: kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit.

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan sumber-sumber data dokumenter seperti laporan tahunan perusahaan yang menjadi sampel penelitian yang diperoleh dari situs BEI yaitu www.idx.co.id, data berdasarkan *Indonesian Capital Market Directory* (ICMD) yang terdapat di pojok BEI Universitas Brawijaya.

3.4 Definisi Operasional Variabel

3.4.1 Variabel Dependen (Variabel Terikat)

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang akan dibayar untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Proksi utama dalam penelitian ini adalah *Effective Tax Rates* (ETR).

Effective Tax Rates (ETR) menggambarkan ratio antara beban pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan dibandingkan dengan laba sebelum pajak perusahaan. Selain itu, ETR merupakan proksi yang paling banyak digunakan dalam penelitian terdahulu seperti penelitian yang dilakukan Lanis dan Richardson (2012), Jessica dan Toli (2014), dan Wijayanti dan Chomsatu (2016). Penggunaan ETR diharapkan mampu memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai beban pajak yang akan berdampak pada laba akuntansi yang dapat dilihat dalam catatan atas laporan keuangan perusahaan (Astuti & Aryani, 2016). ETR telah memperhitungkan

beban pajak tahun berjalan dan pajak tangguhan perusahaan. Koreksi fiskal yang menjadi indikasi dilakukannya penghindaran pajak oleh manajemen terdapat dalam penghasilan kena pajak tahun berjalan dan pajak tangguhan perusahaan. Proksi ETR dapat dihitung dengan cara membagi beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. Proksi ETR dapat dihitung dari:

$$ETR = \frac{\text{Beban pajak penghasilan}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

3.4.2 Variabel Independen (Variabel Bebas)

3.4.2.1 Pertanggungjawaban Sosial

Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengungkapan pertanggungjawaban sosial yang telah dilaksanakan oleh perusahaan. Pengungkapan pertanggungjawaban sosial yang dilakukan oleh suatu perusahaan merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. Pada penelitian ini mengadopsi indikator penelitian Hackston dan Milne (1996) dalam Lanis dan Richardson (2013) dengan menggunakan instrumen interogasi, *check list* dan keputusan yang relevan. Pengukuran *check list* ini dilakukan dengan mencocokkan item pada *check list* dengan item yang diungkapkan perusahaan.

Terdapat 90 item pengungkapan namun menurut peraturan BAPEPAM No VIII.G.2 hanya 78 item pengungkapan yang sesuai dengan kondisi di Indonesia. Jumlah item yang diungkapkan perusahaan adalah sejumlah 78 item yang terdiri atas kategori lingkungan (13 item), kategori energi (7 item), kategori kesehatan dan

keselamatan tenaga kerja (8 item), kategori lain-lain tenaga kerja (29 item), kategori produk (10 item), kategori keterlibatan masyarakat (9 item), dan kategori umum (2 item).

Rumus untuk pengukuran pengungkapan pertanggungjawaban sosial yaitu:

$$TCSR_{li} = \frac{\sum X_{yi}}{N_i}$$

$TCSR_{li}$: Indeks luas pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan
 $\sum X_{yi}$: Nilai 1 = jika item y diungkapkan; 0 = jika item y tidak diungkapkan
 N_i : Jumlah item untuk perusahaan i

3.4.2.2 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dan dana perwalian serta institusi lainnya. Institusi-institusi tersebut memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan atas kinerja manajemen. Indikator yang digunakan untuk mengukur kepemilikan institusional adalah persentase saham perusahaan yang dimiliki perusahaan lain. Kepemilikan institusional dapat dihitung dari:

$$INST = \frac{\text{Jumlah Saham Institusi}}{\text{Jumlah Saham Beredar}}$$

3.4.2.3 Komisaris Independen

Indikator yang digunakan untuk mengukur komisaris independen adalah jumlah anggota komisaris independen dan seluruh anggota komisaris baik komisaris independen maupun non-independen. Menurut Kurniasih dan Sari (2014) komisaris

independen dapat diukur menggunakan persentase jumlah komisaris independen terhadap jumlah total komisaris dalam susunan dewan perusahaan.

$$KOM = \frac{\text{Jumlah anggota dewan komisaris dari luar perusahaan}}{\text{Seluruh anggota dewan komisaris perusahaan}}$$

3.4.2.4 Komite Audit

Komite audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian. Indikator yang digunakan untuk mengukur komite audit adalah jumlah seluruh komite audit dalam suatu perusahaan. Menurut Kurniasih dan Sari (2013) komite audit dapat diukur dengan mencatat jumlah anggota komite audit pada suatu perusahaan.

$$AUD = \text{Jumlah seluruh komite audit}$$

3.4.2.5 Leverage

Rasio *leverage* digunakan oleh manajer dalam rangka pengambilan keputusan pendanaan. Indikator yang digunakan untuk mengukur *leverage* adalah total *liabilities* dan total equity dalam suatu perusahaan. Menurut Kurniasih dan Sari (2013) *leverage* dapat dihitung dengan total utang baik jangka pendek maupun jangka panjang dengan total *debt to equity ratio* dengan rumus sebagai berikut:

$$LEV = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Equity}}$$

3.5 Metode Analisis Data

3.5.1 Uji Asumsi Klasik

3.5.1.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Uji normalitas dilakukan untuk melihat bahwa suatu data terdistribusi normal atau tidak (Ghozali, 2011:160). Pengujian terhadap normalitas data dilakukan menggunakan *Kolmogorov-Smirnov Test*, dengan membandingkan *Asymptotic Significance* dengan $\alpha=5\%$. Dasar penarikan kesimpulan adalah dikatakan berdistribusi normal apabila *Asymptotic Significance*-nya $>0,05$ (Ghozali, 2011:165).

3.5.1.2 Uji Multikolinearitas

Uji multi kolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independen*). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Ada atau tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan lawannya, serta *variance inflation factor* (VIF) (Ghozali, 2011:95). Nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena, $VIF=1/tolerance$). Dikatakan terjadi multikolinieritas, jika nilai *tolerance* kurang dari sama dengan 0.10 dan nilai VIF lebih dari 10.

3.5.1.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari *residual* satu pengamatan kepengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antar SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi - Y sesungguhnya) yang telah di-*studentized* (Ghozali, 2011:143-145). Dasar analisisnya adalah:

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

3.5.1.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah uji yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antar data yang diurutkan berdasarkan urutan waktu (*time series*). Untuk pengujian autokorelasi dilakukan dengan metode *Durbin-Watson*. Apabila nilai *Durbin-Watson* yang dihasilkan $d > d_U$ dan $(k - d) > d_U$ maka dapat dinyatakan bahwa model regresi terbebas dari gangguan autokorelasi, baik autokorelasi positif maupun autokorelasi negatif. Dimana nilai (d) merupakan nilai DW, d_U merupakan

nilai tabel DW dan (k) merupakan jumlah variabel independen (Ghozali, 2011: 110-111).

3.5.2 Pengujian Hipotesis

3.5.2.1 Model Pengujian

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini. Model penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

$$ETR = \beta_0 + \beta_1 TCSR + \beta_2 INST + \beta_3 KOM + \beta_4 AUD + \beta_5 LEV + e$$

Keterangan:

ETR : Agresivitas Penghindaran Pajak

β_0 : Konstanta

$\beta_1 - \beta_6$: Koefisien Regresi

TCSR : Pengungkapan pertanggungjawaban sosial

INST : Kepemilikan Institusional

KOM : Komisaris Independen

AUD : Komite Audit

LEV : *Leverage*

e : error terms

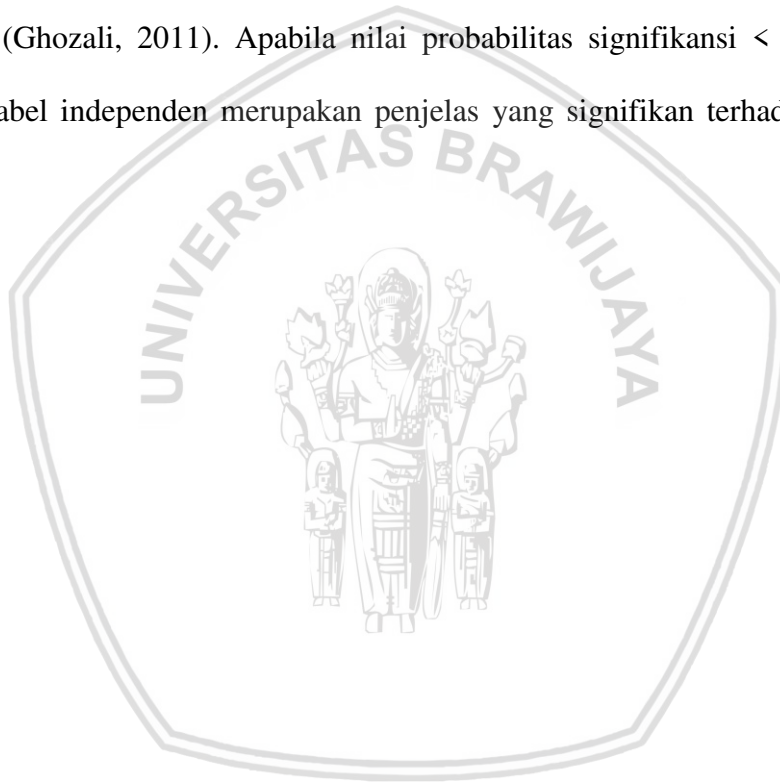
3.5.2.2 Uji F

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011). Apabila

nilai probabilitas signifikansi < 0.05 , maka variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen.

3.5.2.3 Uji T

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011). Apabila nilai probabilitas signifikansi < 0.05 , maka suatu variabel independen merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan populasi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2015-2016. Metode pemilihan sampel menggunakan *purposive sampling*, yaitu populasi yang dijadikan sampel merupakan sampel yang memenuhi kriteria tertentu, dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Jumlah perusahaan yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 159 perusahaan manufaktur tiap tahun yang merupakan perusahaan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia.

Jumlah sampel yang akan diteliti dalam penelitian ini ada perusahaan. Hal ini dikarenakan perusahaan tersebut memenuhi kriteria yang ada. Perhitungan penentuan sampel dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Perhitungan Penentuan Sampel

No	Keterangan	Jumlah Perusahaan
1.	Jumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2016.	132
2.	Jumlah perusahaan manufaktur yang tidak menyajikan laporan keuangan secara lengkap.	(29)
3.	Perusahaan manufaktur yang menyajikan data keuangan dengan mata uang selain rupiah periode tahun 2015-2016.	(29)
4.	Perusahaan manufaktur yang tidak menyajikan <i>Corporate Social Responsibility Disclosure</i> dalam <i>annual report</i> .	(7)

No	Keterangan	Jumlah Perusahaan
5.	Perusahaan manufaktur yang tidak menyediakan data mekanisme GCG dalam <i>annual report</i> periode tahun 2015-2016.	(3)
6.	Perusahaan manufaktur yang memiliki kerugian selama periode tahun 2015-2016.	(12)
7.	<i>Outlier</i>	(1)
8.	Sampel	51
11.	Total Sampel (51x2)	102

Sumber: Data diolah

4.1.2 Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi dari suatu data yang dilihat dari jumlah sampel, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*), dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Hasil analisis deskriptif dapat diketahui melalui penjelasan berikut:

Tabel 4.2
Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ETR	102	,0239	,5678	,257244	,0841499
CSR	102	,2821	,6923	,525010	,0834403
INST	102	,0687	,9973	,640424	,2353822
KI	102	,2000	,7143	,395432	,0993091
AUD	102	2,0000	5,0000	3,225490	,6880430
LEV	102	,0003	,7666	,274251	,1758151
Valid N (listwise)	102				

Sumber: Data diolah

Berdasarkan dari tabel 4.2 menunjukkan bahwa nilai minimum dari variabel agresivitas penghindaran pajak (ETR) adalah sebesar 0,0239. Nilai maksimum dari variabel agresivitas penghindaran pajak (ETR) adalah sebesar

0,5678. Nilai *mean* dari variabel agresivitas penghindaran pajak (ETR) adalah sebesar 0,257244 dan nilai standar deviasi dari variabel ETR adalah sebesar 0,0841499.

Berdasarkan dari statistik deskriptif tabel 4.2 menunjukkan bahwa nilai minimum dari variabel pertanggungjawaban sosial (CSR) adalah sebesar 0,2821. Nilai maksimum dari variabel pertanggungjawaban sosial (CSR) adalah sebesar 0,6923. Nilai *mean* dari variabel pertanggungjawaban sosial (CSR) adalah sebesar 0,525010 dan standar deviasi dari variabel pertanggungjawaban sosial (CSR) adalah sebesar 0,0834403.

Berdasarkan dari statistik deskriptif tabel 4.2 menunjukkan bahwa nilai minimum dari variabel kepemilikan institusional (INST) adalah sebesar 0,0687. Nilai maksimum dari variabel kepemilikan institusional (INST) adalah sebesar 0,9973. Nilai *mean* dari variabel kepemilikan institusional (INST) adalah 0,640424 dan standar deviasi dari variabel kepemilikan institusional (INST) adalah sebesar 0,2353822.

Berdasarkan dari statistik deskriptif tabel 4.2 menunjukkan bahwa nilai minimum dari variabel komisaris independen (KI) adalah sebesar 0,2000. Nilai maksimum variabel komisaris independen (KI) adalah sebesar 0,7143. Nilai *mean* variabel komisaris independen (KI) adalah sebesar 0,395432 dan standar deviasi variabel komisaris independen (KI) adalah sebesar 0,0993091.

Berdasarkan dari statistik deskriptif tabel 4.2 menunjukkan bahwa nilai minimum dari variabel komite audit (AUD) adalah sebesar 2,0000. Nilai maksimum variabel komite audit (AUD) adalah sebesar 5,0000. Nilai *mean*

variabel komite audit (AUD) adalah sebesar 3,225490, dan standar deviasi variabel komite audit (AUD) adalah sebesar 0,6880430.

Berdasarkan statistik deskriptif tabel 4.2 menunjukkan bahwa nilai minimum dari variabel *leverage* (LEV) adalah sebesar 0,0003. Nilai maksimum dari variabel *leverage* (LEV) adalah sebesar 0,7666. Nilai *mean* dari variabel *leverage* (LEV) adalah sebesar 0,274251 dan standar deviasi dari variabel *leverage* (LEV) adalah sebesar 0,1758151.

4.1.3 Hasil Pengujian Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel dependen dan variabel independen berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk menguji normalitas data, pada penelitian ini menggunakan metode uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov*. Selengkapnya mengenai hasil uji normalitas penelitian dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3
Hasil Uji Normalitas Menggunakan Kolmogorov-Sminov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Predicted Value
N		102
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,2572441
	Std. Deviation	,05461573
Most Extreme Differences	Absolute	,061
	Positive	,061
	Negative	-,046
Kolmogorov-Smirnov Z		,621
Asymp. Sig. (2-tailed)		,835

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data diolah

Dari Tabel 4.3 didapat bahwa nilai *Kolmogrov-Smirnov* sebesar 0,621 dengan signifikasi 0,835. Data terdistribusi normal bila signifikansinya lebih dari 0,05. Karena *asymp sig. (2-tailed)* yang diperoleh lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini terdistribusi normal.

b. Uji Multikolonieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik adalah model regresi yang bebas dari multikolonieritas. Multikolonieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Batas dari nilai VIF adalah 10 dan nilai *tolerance* kurang dari 0,1 maka akan terjadi multikolonieritas dan modl regresi tidak layak dipakai. Hasil perhitungan nilai *tolerance* serta VIF dapat diketahui pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4
Pengujian Multikolinieritas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Tolerance	VIF
(Constant)	,467	,059		
CSR	-,262	,094	,695	1,439
INST	-,105	,031	,803	1,246
KI	,021	,066	,984	1,016
AUD	,010	,010	,996	1,004
LEV	-,159	,040	,845	1,183

a. Dependent Variable: ETR

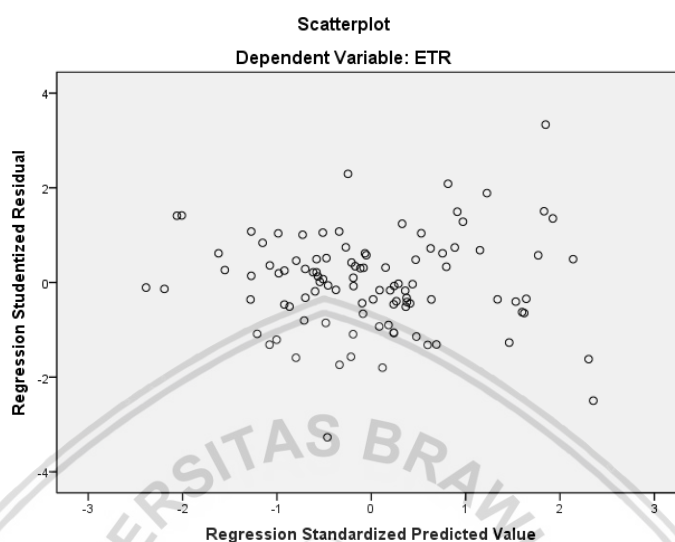
Sumber: Data diolah

Dari hasil output diatas dapat diketahui bahwa nilai *tolerance* dari setiap variabel independen lebih dari 0,10 dan nilai VIF dari setiap variabel tidak lebih dari 10. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah model regresi yang bebas dari masalah heteroskedastisitas (homoskedastisitas). Uji heteroskedastisitas penelitian ini menggunakan *scatterplot*. Selengkapnya mengenai hasil uji untuk heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 1
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber data: Diolah SPSS

Gambar diatas menunjukkan bahwa berdasarkan *scatterplot* diatas dapat diketahui bahwa titik-titik residual menyebar secara acak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa residual memiliki ragam yang homogen, sehingga asumsi heteroskedastisitas dinyatakan terpenuhi.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi memiliki tujuan untuk menguji apakah sebuah model regresi linear adalah korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Autokorelasi dalam penelitian ini dideteksi dengan menggunakan uji *Durbin Watson* yaitu dengan membandingkan nilai *Durbin Watson* (d) dengan nilai *Durbin Watson* tabel yaitu batas lebih tinggi (*upperbond* atau du) dan batas lebih rendah (*lower bond* atau dl). Hasil uji autokorelasi dengan *Durbin Watson* dapat dilihat pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,649 ^a	,421	,391	,0656642	1,833

a. Predictors: (Constant), LEV, KI, AUD, INST, CSR

b. Dependent Variable: ETR

Sumber: Data diolah

Dari tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa nilai *Durbin-Watson* (DW Hitung) sebesar 1,833 nilai ini dibandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan signifikansi 0,05, jumlah sampel (n) 102 dan jumlah variabel independen 5 (k=5), maka nilai pada tabel DW yaitu dU 1,7813 dan dL 1,5762. Oleh karena itu nilai DW 1,833 lebih besar dari batas (dU) 1,7813 dan kurang dari 4-1,7813 (4-dU), maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi positif atau negatif atau dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi.

4.1.4 Hasil Pengujian Hipotesis

4.1.4.1 Analisis Regresi Berganda

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan regresi berganda untuk mencari pengaruh variabel pertanggungjawaban sosial (CSR), kepemilikan institusional (INST), komisaris independen (KI), komite audit (AUD), dan *leverage* (LEV) terhadap agresivitas penghindaran pajak (ETR). Hasil pengujian dapat dilihat melalui Tabel 4.6.

Tabel 4.6
Hasil Analisis Regresi Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,467	,059		7,972	,000
	CSR	-,262	,094	-,260	-2,793	,006
	INST	-,105	,031	-,295	-3,403	,001
	KI	,021	,066	,025	,314	,754
	AUD	,010	,010	,079	1,022	,309
	LEV	-,159	,040	-,333	-3,941	,000

a. Dependent Variable: ETR

Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil uji analisis berganda pada tabel 4.6 diperoleh persamaan:

$$ETR = \beta_0 + \beta_1 TCSR + \beta_2 INST + \beta_3 KOM + \beta_4 AUD + \beta_5 LEV + e$$

$$ETR = 0,467 + (-0,262)CSR + (-0,105)INST + 0,021KI + 0,010AUD + (-0,159)LEV + e$$

Persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Koefisien konstanta sebesar 0,467 menunjukkan apabila variabel CSR, INST, KI, AUD, dan LEV bernilai konstan (tidak berubah) maka perubahan variabel agresivitas penghindaran pajak sebesar 0,467.
2. Koefisien variabel pertanggungjawaban sosial (CSR) memiliki nilai sebesar -0,262 artinya bahwa meningkatnya variabel pertanggungjawaban sosial (CSR) sebesar 1 point, maka dapat menurunkan ETR sebesar -0,262. Hal tersebut mengindikasikan bahwa variabel pertanggungjawaban

sosial (CSR) berpengaruh negatif terhadap variabel agresivitas penghindaran pajak.

3. Koefisien variabel kepemilikan institusional (INST) memiliki nilai sebesar -0,105 artinya bahwa meningkatnya variabel kepemilikan institusional (INST) sebesar 1 point, maka dapat menurunkan ETR sebesar -0,105. Hal tersebut mengindikasikan bahwa variabel kepemilikan institusional (INST) berpengaruh negatif terhadap variabel agresivitas penghindaran pajak.
4. Koefisien variabel komisaris independen (KI) memiliki nilai sebesar 0,021 artinya bahwa meningkatnya variabel komisaris independen (KI) sebesar 1 point, maka dapat menaikkan ETR sebesar 0,021. Hal tersebut mengindikasikan variabel komisaris independen (KI) berpengaruh positif terhadap variabel agresivitas penghindaran pajak.
5. Koefisien variabel komite audit (AUD) memiliki nilai sebesar 0,010 artinya bahwa meningkatnya variabel komite audit (AUD) sebesar 1 point, maka dapat menaikkan ETR sebesar 0,010. Hal tersebut mengindikasikan variabel komite audit (AUD) berpengaruh positif terhadap variabel agresivitas penghindaran pajak.
6. Koefisien variabel *leverage* (LEV) memiliki nilai sebesar -0,159 artinya bahwa meningkatnya variabel pertanggungjawaban sosial (CSR) sebesar 1 point, maka dapat menurunkan ETR sebesar (-0,159). Hal tersebut mengindikasikan variabel *leverage* (LEV) berpengaruh negatif terhadap variabel agresivitas penghindaran pajak.

Tabel 4.7
Hasil Adjusted R²

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,649 ^a	,421	,391	,0656642

a. Predictors: (Constant), LEV, KI, AUD, INST, CSR

b. Dependent Variable: ETR

Sumber: Data diolah

Dari Tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa nilai Adj R² sebesar 0,391 dalam hal ini sebesar 39% variasi variabel dependen (ETR) yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen (CSR, INST, KI, AUD, LEV), sedangkan sisanya yang sebesar 61% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian.

4.1.4.2 Pengujian Hipotesis Uji F

Uji pengaruh simultan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen. Hasil uji F dalam penelitian dapat dilihat pada tabel 4.8.

Tabel 4.8
Hasil Uji F

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,301	5	,060	13,974	,000 ^a
	Residual	,414	96	,004		
	Total	,715	101			

a. Predictors: (Constant), LEV, KI, AUD, INST, CSR

b. Dependent Variable: ETR

Sumber: Data diolah

Dari tabel 4.8 di atas dapat diketahui bahwa model persamaan ini memiliki tingkat signifikansi, yaitu 0,000 lebih kecil dibandingkan taraf signifikansi α (0,05), maka disimpulkan bahwa variabel independen (CSR, INST, KI, AUD, dan LEV) dalam model penelitian ini secara simultan dapat berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu agresivitas penghindaran pajak (ETR).

4.1.4.3 Pengujian Hipotesis Uji T

Pengujian hipotesis parsial digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel pertanggungjawaban sosial (CSR), kepemilikan institusional (INST), komisaris independen (KI), komite audit (AUD), dan *leverage* (LEV) terhadap variabel agresivitas penghindaran pajak. Hasil pengujian hipotesis untuk masing-masing variabel independen dapat dilihat pada tabel 4.9.

Tabel 4.9
Hasil Uji T

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,467	,059		7,972	,000
CSR	-,262	,094	-,260	-2,793	,006
INST	-,105	,031	-,295	-3,403	,001
KI	,021	,066	,025	,314	,754
AUD	,010	,010	,079	1,022	,309
LEV	-,159	,040	-,333	-3,941	,000

a. Dependent Variable: ETR

Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil uji statistik t menunjukan bahwa dari 5 variabel yang dimasukan dalam model regresi, hanya variabel pertanggungjawaban sosial (CSR),

kepemilikan institusional (INST), dan *leverage* (LEV) yang signifikan mempengaruhi agresivitas penghindaran pajak (ETR). Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas signifikan untuk CSR sebesar 0.006 ($< 0,05$), INST sebesar 0,001 ($< 0,05$), dan LEV sebesar 0,000 ($< 0,05$). Sedangkan variabel komisaris independen (KI) dan Komite Audit (AUD) ditemukan tidak signifikan. Hal ini terlihat dari nilai probabilitas signifikansi KI sebesar 0,754 ($> 0,05$) dan AUD sebesar 0,309 ($> 0,05$). Dalam tabel 4.8 dapat disimpulkan bahwa agresivitas penghindaran pajak hanya dipengaruhi oleh pertanggungjawaban sosial, komisaris independen, dan *leverage*.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pertanggungjawaban Sosial

Dari hasil penelitian didapatkan nilai koefisien variabel pertanggungjawaban sosial adalah sebesar -0,262. Artinya bahwa meningkatnya variabel pertanggungjawaban sosial (CSR) sebesar 1 point, maka dapat menurunkan ETR sebesar -0,262. Hal ini menunjukkan hubungan negatif antara tingkat aktivitas pertanggungjawaban sosial dengan tingkat agresivitas penghindaran pajak perusahaan yang artinya semakin tinggi tingkat aktivitas pertanggungjawaban sosial sebuah perusahaan, maka semakin rendah tingkat agresivitas penghindaran pajaknya. Nilai signifikansi variabel pertanggungjawaban sosial (CSR) adalah sebesar 0,006 $< 0,005$. Dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban sosial berpengaruh negatif terhadap agresivitas penghindaran pajak. Maka hipotesis ke-1 diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lanis dan Richardson (2012) yang menyatakan bahwa jika perusahaan memilih untuk melakukan aktivitas pertanggungjawaban sosial maka perusahaan tersebut cenderung melakukan tingkat agresivitas penghindaran pajak yang lebih rendah. Selain itu hasil penelitian ini sejalan dengan teori legitimasi yang menyatakan bahwa sistem nilai perusahaan sejalan dengan sistem nilai dari sistem sosial yang lebih besar dimana perusahaan merupakan bagiannya. Ketika perusahaan melakukan kegiatan pertanggungjawaban sosial dan menyajikan pengungkapan pertanggungjawaban sosial maka legitimasi (pengakuan) dan kepercayaan dari masyarakat akan meningkat dan diharapkan perusahaan akan meminimalisasikan tindakan agresivitas penghindaran pajak agar tetap mendapatkan pengakuan dari masyarakat.

Aktivitas pertanggungjawaban sosial merupakan suatu tindakan yang tidak hanya memperhitungkan ekonomi tetapi juga sosial, lingkungan dan dampak lain dari tindakan yang dilakukan perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat. Perusahaan dengan aktivitas pertanggungjawaban sosial tinggi akan lebih hati-hati dalam melakukan agresivitas penghindaran pajak karena hal ini tentu saja akan bertentangan dengan nilai pelaksanaan pertanggungjawaban sosial itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan perusahaan sadar bahwa dengan melakukan penghindaran pajak akan merusak reputasi perusahaan dimata masyarakat dan akan mengancam keberlangsungan hidup perusahaan. Hal ini dikarenakan perusahaan yang melakukan pengungkapan pertanggungjawaban sosial akan lebih

dekat dengan masyarakat yang menyebabkan adanya sorotan lebih dari masyarakat akan perusahaan tersebut.

Masyarakat akan lebih peka terhadap perusahaan yang melakukan pertanggungjawaban sosial dibanding perusahaan yang tidak melakukan pertanggungjawaban sosial. Hal ini akan menyebabkan perusahaan akan memiliki keterbatasan untuk melakukan kecurangan karena adanya sorotan lebih dari masyarakat. Salah satu kecurangan yang mungkin dapat dilakukan oleh perusahaan adalah agresivitas penghindaran pajak. Sedikit saja perusahaan melakukan kecurangan, masyarakat akan mengetahuinya dan akan mengancam keberlangsungan hidup perusahaan. Contohnya terdapat pada indikator masyarakat, tentunya perusahaan-perusahaan yang menjalankan pengungkapan pertanggungjawaban sosial indikator masyarakat akan lebih dipandang oleh masyarakat dibanding yang tidak menjalankan. Sehingga semakin tingginya aktivitas pertanggungjawaban sosial yang dilakukan oleh perusahaan maka semakin tinggi pula sikap patuh perusahaan tersebut dalam membayar pajak.

4.2.2 Kepemilikan Institusional

Dari hasil penelitian didapatkan nilai koefisien variabel kepemilikan institusional adalah sebesar -0,105. Artinya bahwa meningkatnya kepemilikan institusional (INST) sebesar 1 point maka dapat menurunkan ETR sebesar -0,105. Hal ini menunjukkan hubungan negatif antara besarnya kepemilikan institusional dengan tingkat agresivitas penghindaran pajak perusahaan yang artinya semakin tinggi kepemilikan institusional sebuah perusahaan, maka semakin rendah tingkat agresivitas penghindaran pajaknya. Nilai signifikansi variabel kepemilikan

institusional adalah sebesar $0,001 < 0,005$. Dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap agresivitas penghindaran pajak. Maka hipotesis ke-2 diterima.

Dari hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Puspitasari (2014) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif dengan agresivitas penghindaran pajak. Semakin tinggi kepemilikan institusional, maka semakin tinggi jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan karena semakin kecil kemungkinan praktik agresivitas penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini disebabkan oleh pemilik institusional berdasarkan besar dan hak suara yang dimiliki, dapat memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk berperilaku mementingkan diri sendiri.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh teori agensi yang menyatakan bahwa pemilik institusional dapat memainkan peran yang penting dalam memantau, mendisiplinkan, dan mempengaruhi manajer. Manajer akan berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk berperilaku mementingkan diri sendiri. Termasuk dalam hal melakukan manajemen pajak.

Peran dari pemilik institusional di dalam suatu perusahaan jika dijalankan dengan baik maka akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal kepada manajer dan akan meminimalkan konflik yang terjadi antara principal dan agen. Hal tersebut akan membuat manajer bertindak lebih hati-hati dalam mengambil suatu keputusan dan menghindari peluang untung mementingkan diri

sendiri. Hal ini akan berdampak pada keputusan manajer untuk tidak melakukan tindakan agresivitas penghindaran pajak.

4.2.3 Komisaris Independen

Dari hasil penelitian didapatkan nilai koefisien variabel komisaris independen adalah sebesar 0,021. Artinya bahwa meningkatnya komisaris independen sebesar 1 point, maka dapat menaikkan ETR sebesar 0,021. Hal ini menunjukkan hubungan positif antara besarnya komisaris independen dengan tingkat agresivitas penghindaran pajak perusahaan yang artinya semakin besar komisaris independen sebuah perusahaan, maka semakin tinggi tingkat agresivitas penghindaran pajaknya. Nilai signifikansi variabel komisaris independen adalah sebesar $0,754 > 0,005$. Dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap agresivitas penghindaran pajak. Maka hipotesis ke-3 ditolak.

Dari hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti, Anita dan Chomsatu (2016) yang menyatakan bahwa komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan proporsi komisaris independen tidak mampu mengendalikan manajemen untuk tidak melakukan manipulasi dalam menyajikan laporan keuangan. Hal ini memberikan kesempatan bagi manajer untuk melakukan aktivitas manipulasi laba yang akan berpengaruh terhadap pajak perusahaan (Wijayanti, Anita dan Chomsatu, 2016). Selain itu, hasil penelitian Annisa dan Kurniasih (2012) juga berpendapat sama yaitu komisaris independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat agresivitas penghindaran

pajak. Hal ini dikarenakan komisaris independen yang merupakan bagian dari komisaris perseroan tidak melakukan fungsi pengawasan secara baik terhadap manajemen (Annisa dan Kurniasih 2012).

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan teori agensi yang menyatakan bahwa adanya komisaris independen dapat meminimalkan konflik keagenan karena komisaris independen dapat mempengaruhi pengambilan keputusan perpajakan perusahaan, terutama dalam prinsip transparansi yang diharapkan dengan adanya keterbukaan informasi kepada komisaris independen, perusahaan akan cenderung mengambil tindakan perpajakan yang tidak beresiko dengan tidak melakukan agresivitas penghindaran pajak.

Proporsi komisaris independen tidak mampu mengendalikan manajemen untuk tidak melakukan manipulasi dalam menyajikan laporan keuangan seperti menimalisasi beban pajak dengan melakukan tindakan agresivitas penghindaran pajak untuk mendapatkan laba yang maksimal. Hal tersebut diduga karena adanya komisaris independen hanya untuk memenuhi peraturan saja, sehingga kinerjanya tidak mempengaruhi keputusan manajer.

4.2.4 Komite Audit

Dari hasil penelitian didapatkan nilai koefisien variabel komite audit adalah sebesar 0,010. Artinya bahwa meningkatnya komite audit (AUD) sebesar 1 point maka dapat menaikkan ETR sebesar 0,012. Hal ini menunjukkan hubungan positif antara besarnya komite audit dengan tingkat agresivitas penghindaran pajak perusahaan yang artinya semakin banyaknya komite audit sebuah perusahaan, maka semakin tinggi tingkat agresivitas penghindaran pajaknya. Nilai

signifikansi variabel komite audit adalah sebesar $0,309 > 0,005$. Dapat disimpulkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas penghindaran pajak. Maka hipotesis ke-4 ditolak.

Dari hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti, Anita dan Chomsatu (2016) yang menyatakan bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas penghindaran pajak. Selain itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Damayanti dan Susanto (2015) juga menyatakan bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat agresivitas penghindaran pajak.

Menurut BEI dan Bapepam-LK, setiap perusahaan yang terdaftar di BEI wajib memiliki komite audit, yang anggotanya terdiri dari satu orang komisaris independen sebagai ketua dan minimal 2 orang pihak eksternal perusahaan yang independen sebagai anggota. Dewan komisaris wajib membentuk komite audit sekurang-kurangnya 2 orang yang diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab terhadap dewan komisaris (Damayanti dan Susanto, 2015). Wijayanti, Anita dan Chomsatu (2016) menyatakan tidak berpengaruhnya komite audit terhadap penghindaran pajak diduga karena pengawasan dan saran-saran yang diberikan komite audit masih kurang, sehingga tidak memberikan pengaruh terhadap jumlah pajak perusahaan atau diduga karena komunikasi dengan pihak manajemen perusahaan, dewan komisaris, dan pihak-pihak terkait tidak berjalan lancar sehingga efektivitas komite audit masih kurang. Selain itu, diduga juga karena kewenangan komite audit juga dibatasi oleh dewan komisaris.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan teori agensi yang menyatakan bahwa adanya komite audit bertugas untuk melakukan kontrol dalam proses penyusunan laporan keuangan untuk menghindari kecurangan pihak manajemen terutama dalam menentukan manajemen pajak. Hal tersebut dapat mempengaruhi manajer agar tidak melakukan tindakan agresivitas penghindaran pajak. Komite audit tidak mampu meminimalkan konflik kepentingan dalam suatu perusahaan. Semakin banyak jumlah komite audit dalam suatu perusahaan, maka akan semakin banyak kontrol yang dilakukan untuk pihak manajemen. Namun, hal tersebut tetap tidak berpengaruh terhadap keputusan yang diambil oleh manajemen terutama dalam hal perpajakan.

4.2.5 *Leverage*

Dari hasil penelitian yang didapat koefisien variabel *leverage* (LEV) memiliki nilai sebesar -0,159 artinya bahwa meningkatnya variabel *leverage* (LEV) sebesar 1 point maka dapat menurunkan ETR sebesar -0,159. Hal tersebut mengindikasikan variabel *leverage* (LEV) berpengaruh negatif terhadap variabel agresivitas penghindaran pajak yang artinya semakin besar *leverage* sebuah perusahaan, maka semakin rendah tingkat agresivitas penghindaran pajaknya. Nilai signifikansi variabel kepemilikan institusional adalah sebesar $0,000 < 0,005$. Dapat disimpulkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap agresivitas penghindaran pajak. Maka hipotesis ke-5 diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Singly dan Sukartha (2015) menemukan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang

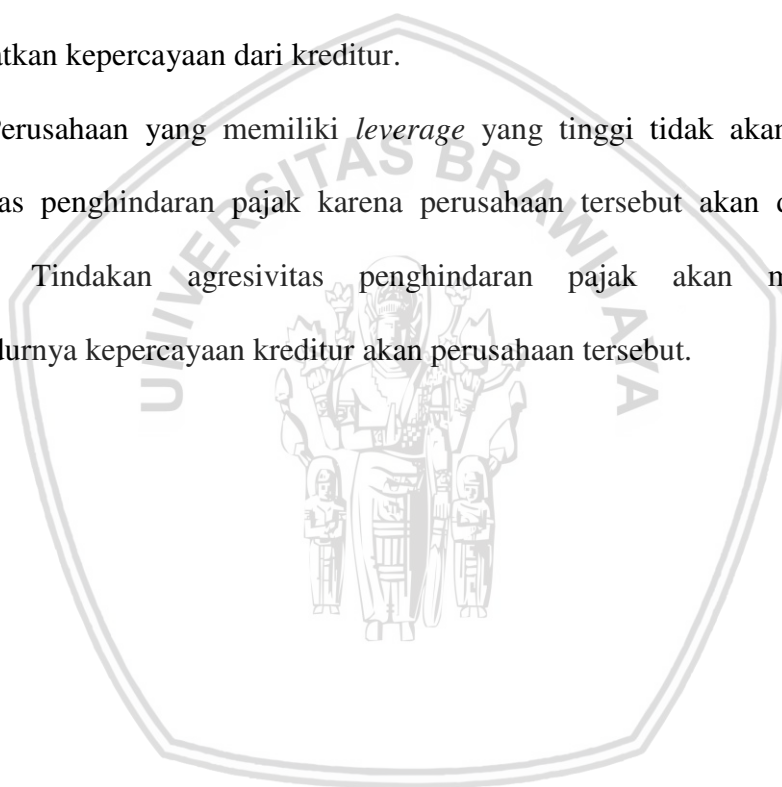
dilakukan Aditama (2016) yang menunjukkan bahwa *leverage* memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini diduga karena semakin tinggi *leverage* berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut yang berarti semakin banyak jumlah kreditur yang percaya dengan perusahaan tersebut. Perusahaan akan berupaya untuk tidak melakukan agresivitas penghindaran pajak karena dengan melakukan agresivitas penghindaran pajak perusahaan khawatir kepercayaan kreditur akan mengendur.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori *debt covenant* menyatakan semakin banyak jumlah kreditur maka perusahaan akan berusaha menstabilkan laba karena diawasi oleh kreditur. Sehingga semakin besar utang perusahaan, semakin besar pihak yang memberi pinjaman dalam memantau atau mengawasi perusahaan tersebut karena kekhawatiran perusahaan atau pihak pemberi utang akan utangnya jika tidak terlunasi. Hal ini akan membuat perusahaan yang memiliki utang yang besar akan berhati-hati dalam membuat keputusan untuk pelaporan keuangan yang akan berdampak pada keputusan perpajakan perusahaan.

Perusahaan dengan *leverage* yang tinggi berarti memiliki kepercayaan lebih dari kreditur dan perusahaan tersebut akan lebih diawasi oleh kreditur. Kreditur akan percaya terhadap suatu perusahaan apabila perusahaan dapat dikatakan sehat dan bersih seperti tidak memiliki konflik, tidak memiliki tanggungan, tidak melakukan kecurangan dan terbebas dari sengketa hukum. Adanya perjanjian utang antara perusahaan dan kreditur akan menjamin

perusahaan untuk tetap sehat dan bersih agar dapat membayar utang perusahaan dan kreditur tetap percaya atas perusahaan tersebut. Hal tersebut akan menyebabkan perusahaan akan memiliki keterbatasan melakukan kecurangan karena adanya pengawasan lebih dari kreditur salah satu kecurangan yang dapat terjadi adalah penghindaran pajak. Maka diharapkan perusahaan dengan *leverage* yang tinggi akan meminimalisasikan tindakan penghindaran pajak agar tetap mendapatkan kepercayaan dari kreditur.

Perusahaan yang memiliki *leverage* yang tinggi tidak akan melakukan agresivitas penghindaran pajak karena perusahaan tersebut akan diawasi oleh kreditur. Tindakan agresivitas penghindaran pajak akan menyebabkan mengendurnya kepercayaan kreditur akan perusahaan tersebut.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban sosial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan ketika semakin tingginya perusahaan melakukan aktivitas pertanggungjawaban sosial maka perusahaan tersebut akan berusaha meminimalisasi tindakan agresivitas penghindaran pajak. Karena perusahaan dengan aktivitas CSR tinggi akan lebih hati-hati dalam melakukan agresivitas penghindaran pajak karena hal ini tentu saja akan bertentangan dengan nilai pelaksanaan CSR itu sendiri.
2. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional yang tinggi dapat membatasi bahkan menghindari manajemen untuk melakukan tindakan agresivitas penghindaran pajak. Karena pemilik institusional berdasarkan besar dan hak suara yang dimiliki, dapat memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk berperilaku mementingkan diri sendiri maka semakin kecil kemungkinan manajer melakukan praktik agresivitas penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.
3. *Leverage* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki

leverage yang tinggi akan mengurangi tindakan agresivitas penghindaran pajak. Karena perusahaan tersebut akan lebih diawasi oleh pemberi pinjaman yang membuat perusahaan yang memiliki *leverage* yang tinggi tidak akan melakukan agresivitas penghindaran pajak.

4. Penelitian ini gagal menguji pengaruh komisaris independen dan komite audit terhadap agresivitas penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen dan jumlah komite dalam suatu perusahaan audit tidak mampu mengendalikan manajemen untuk meminimalisasi atau menghindari tindakan penghindaran pajak.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan untuk penelitian berikutnya, yaitu variabel penelitian yang dijadikan model dalam penelitian ini, yaitu variabel pertanggungjawaban sosial, tata kelola perusahaan, dan *leverage* pada perusahaan manufaktur. Dalam penelitian ini bahwa 2 proksi dari 3 proksi tata kelola perusahaan yang digunakan gagal membuktikan adanya pengaruh terhadap agresivitas penghindaran pajak, sehingga masih memerlukan justifikasi model lain terutama untuk menentukan faktor yang mempengaruhi agresivitas penghindaran pajak seperti kompensasi rugi fiskal (Kurniasih & Sari, 2013), ukuran perusahaan (Zahirah & Rusli, 2017) dan *Sales Growth* (Swingly & Sukartha, 2015).

5.3 Saran

Saran yang dianjurkan peneliti untuk penelitian selanjutnya adalah hendaknya mempertimbangkan atau menambah variabel independen di luar model

penelitian ini agar dapat diketahui faktor-faktor utama yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak seperti kompensasi rugi fiskal (Kurniasih & Sari, 2013), ukuran perusahaan (Zahirah & Rusli, 2017) dan *Sales Growth* (Swingly & Sukartha, 2015). Peneliti juga menyarankan agar menggunakan proksi lain sehingga adanya perbedaan dan kemungkinan terdapat pengaruh terhadap agresivitas penghindaran pajak.



DAFTAR PUSTAKA

- _____.Keputusan Menteri Keuangan No.423/KMK-06/2002 tentang Jasa Akuntan Publik.
- _____.Peraturan No. VIII.G.2: Laporan Tahunan. No Kep. 28/PM/1996.
- _____.Undang-Undang No. 47 Tahun 2012 Tentang tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- Adisamartha, Idabagus dan Noviari, Naniek. 2015. Pengaruh Likuiditas, *Leverage*, Intensitas Persediaan dan Intensitas Aset Tetap pada Tingkat Agresivitas Wajib Pajak Badan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.Vol 13(3), 973-1000.
- Aditama, Ahmad. 2016. Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, Corporate Governance, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kualitas Audit, dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak. *Simposium Nasional Akuntansi X*.
- Andriyani, Ni Ketut. 2008. Pengaruh Investment Opportunity Set (IOS), Mekanisme Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Leverage pada Kualitas Laba. *Simposium Nasional Akuntansi X*.
- Arief, Ujiyantho Moh & Bambang Agus Pramuka. 2007. Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba, dan Kinerja Keuangan. *Simposium Nasional Akuntansi X*.
- Astuti, Titiek dan Aryani Anni. 2016. Tren Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur di Indonesia yang Terdaftar di BEI Tahun 2001-2014. *Jurnal Akuntansi*.Vol XX (03), 375-388.
- Boediono, Gideon Sb. 2005. Kualitas Laba: Studi Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Dampak Manajemen Laba dengan Menggunakan Analisis Jalur. *Simposium Nasional Akuntansi VII. Bali*.
- Cahyono, Dyas *et all*. 2016. Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Profitabilitas terhadap Tindakan Penghindaran Pajak. *Journal of Accounting*, Vol 2 (2).

- Damayanti, Fitri. Susanto, Tridahas. 2015. Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan dan Return on Assets terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol 5 (2), 60-80.
- Darmawan & Sukartha. 2014. Pengaruh Corporate Governance, Leverage, Return On Assets dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol 9.1, 143-161.
- Deegan, Craig. 2004. *Financial Accounting Theory*. Australia New South Wales: McGraw Hill.
- Desai, M.A., Dharmapala, D. 2006. Corporate Tax Avoidance and High Powered Incentives. *Journal of Accounting and Public Policy*, Vol 16 (1), 1-34.
- Gumanti, Tatang Ary. 2002. Pilihan-Pilihan Akuntansi dalam Aplikasi Teori akuntansi Positif. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, Vol 6. 83-101.
- Gray, et al., 1996, Accounting and Accountability: Changes and Challenges in Corporate Social and Environmental Reporting. Prentice Hall Europe, Hemel Hempstead.
- Indahningrum, Rizka Putri & Handayani, Ratih. 2009. Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dividen, Pertumbuhan Perusahaan, Free Cash Flow, dan Profitabilitas terhadap Kebijakan Hutang Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol 4(2), 165-329.
- Jensen, M.C. & Meckling, W.H. 1976. Theory of the firm: managerial behavior, agency cost and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 305-360.
- Jessica & Toli. 2014. Pengaruh Pengungkapan CSR terhadap Agresivitas Pajak. *Tax Accounting Review*, Vol 4(1).
- Kurniasih, Lulus & Annisa, N A. 2012. pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, Vol 8 (2), 95-189.
- Lanis, R & Richardson, G. 2012. Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: An Empirical Analysis. *Journal Accounting Public Policy*, Vol 31, pp 86-108.

- Lanis, R & G, Richardson. 2013. Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: a test of legitimacy theory. *Journal Accounting Public Policy*, Vol 26 (1), pp 75-100.
- Lanis, R & G, Richardson. 2007. Determinants of Variability in Corporate Effective Tax Rates and Tax Reform. *Journal Accounting Public Policy*, Vol 26, pp 689-704.
- Naser, K., Al-Hussaini, A., Al-Kwari, D., & Nuseibeh, R. (2006). Determinans of Corporate Social Disclosure in Developing Countries: The Case of Qatar. *Advance in International Accounting*. 19, 1-23.
- Ngadiman & Puspitasari. 2014. Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, Vol XVIII (3), 408-421.
- Pohan, Hotman T. 2008. Analisis Pengaruh Kepemilikan Institusi, Rasio Tobin Q, Akrua Pilihan, Tarif Efektif Pajak, dan Biaya Pajak Ditunda terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik*, Vol 4, 113-135.
- Prakoso, Bambang Kesit. 2014. Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, dan Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia. *SNA 17 Matarab Lombok Universitas Mataram*. 24-27 September 2014.
- Puspita, Ratih & Harto, Puji. 2014. Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap penghindaran Pajak. *Diponogoro Journal of Accounting*. Vol 3(2), 2337-3806.
- Sari, Dewi Kartika & Martani, Dwi. 2010. Karakteristik Kepemilikan Perusahaan, Corporate Governance dan Tindakan Pajak Agresif. *Simposium Nasional Akuntansi XIII*.
- Sekaran, U. & Bougie, R. 2013. *Research Methods for Business*. Chister: JohnWiley & Sons Ltd.
- Simamora, Patar & Ryadi, M. R. Mahardika. 2015. Pengaruh Struktur Modal terhadap PPh Badan Terutang pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri

Semen yang Terdaftar di BEI Periode 2010-2013. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi*, Vol 1(2), 21-31

Suandy, Erly. 2016. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Sulistiyanto, H. Sri dan Rika Lidyah. 2002. Good Governance: Antara Idealisme dan Kenyataan. *Modus*. Vol 14(1).

Sumarsan, Thomas. 2015. *Tax Review dan Perencanaan Pajak*. Jakarta: Indeks

Suparno. 2010. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Implementasinya.

Swingly, Calvin & Sukartha, Made. 2015. Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, *Leverage* dan *Sales Growth* pada *Tax Avoidance*. *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol 10(1), 47-62.

Wahidawati. 2002. Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional pada Kebijakan Hutang Perusahaan: Sebuah Perspektif Theory Agency. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*. (5), hal 1-16.

Wahyudi, Dudi. 2015. Analisis Empiris Pengaruh Aktivitas CSR terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia. *Proceeding Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT)*.

Wibisono, Jusuf. 2007. *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*. Gresik: Fascho Publishing.

Wijayanti, Ajeng., Wijayanti, Anita., Chomsatu Yuli. 2016. Pengaruh Karakteristik Perusahaan, GCG dan CSR terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Vol 1 (1), 60-78.

Winata, Fenny. 2014. Pengaruh Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak. *Tax and Accounting Review*, Vol 4 (1), 60-71.

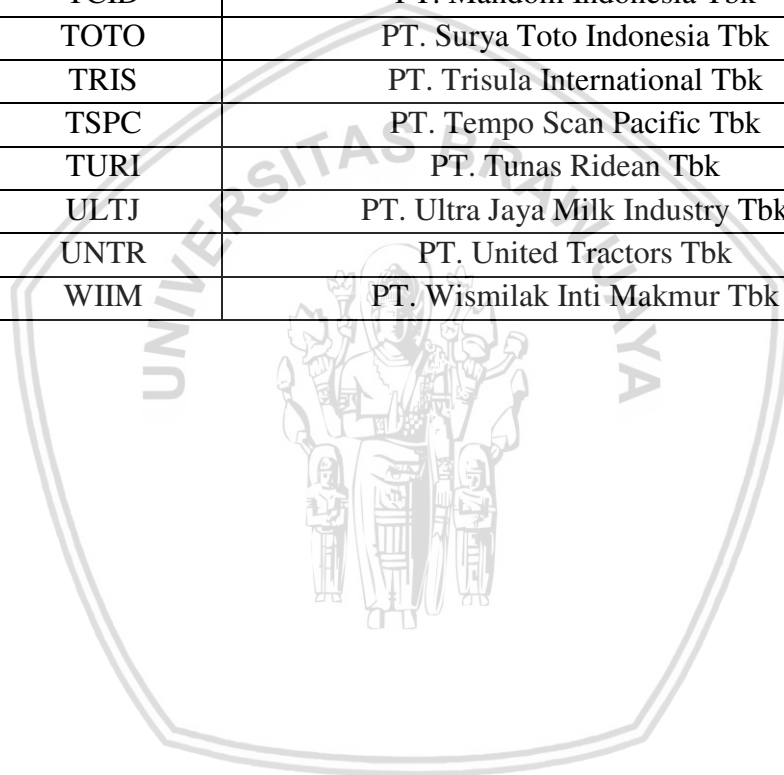
Yonah, Avi dan S, Reuven. 2008. Corporation Social Responsibility and Strategic Tax Behavior. *Law and Economic Working Paper*. Vol XX (03), 375-388.

Zain, Mohammad. 2003. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat

Lampiran 1: Data Sampel Perusahaan

No.	Kode IDX	Nama Perusahaan
1	ADES	PT. Akasha Wira Internasional Tbk
2	AKRA	PT. AKR Corporindo Tbk
3	ASGR	PT. Astra Graphia Tbk
4	BATA	PT. Sepatu Bata Tbk
5	BTON	PT. Betonjaya Manunggal Tbk
6	BUDI	PT. Budi Starch & Sweetener Tbk
7	CPIN	PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk
8	DLTA	PT. Delta Djakarta Tbk
10	DVLA	PT. Darya-Varia Laboratoria Tbk
11	EKAD	PT. Ekadharma International Tbk
12	FAST	PT. Fast Food Indonesia Tbk
13	GGRM	PT. Gudang Garam Tbk
14	HMSP	PT. HM Sampoerna Tbk
15	IGAR	PT. Champion Pacific Indonesia Tbk
16	INAI	PT. Indal Aluminium Industry Tbk
17	INDF	PT. Indofood Sukses Makmur Tbk
18	INDS	PT. Indospring Tbk
19	INTD	PT. Inter-Delta Tbk
20	JECC	PT. Jembo Cable Company Tbk
21	JPFA	PT. JAPFA Comfeed Indonesia Tbk
22	KAEF	PT. Kimia Farma (Persero) Tbk
23	KBLM	PT. Kabelindo Murni Tbk
24	KLBF	PT. Kalbe Farma Tbk
25	LION	PT. Lion Metal Works Tbk
26	LMPI	PT. Langgeng Makmur Industri Tbk
27	LMSH	PT. Lionmesh Prima Tbk
28	LPIN	PT. Multi Prima Sejahtera Tbk
29	LTLS	PT. Lautan Luas Tbk
30	MBTO	PT. Martina Berto Tbk
31	MERK	PT. Merck Tbk
32	MLBI	PT. Multi Bintang Indonesia Tbk
33	MTDL	PT. Metrodata Electronics Tbk
34	MYOR	PT. Mayora Indah Tbk
35	PYFA	PT. Pyridam Farma Tbk
36	RDTX	PT. Roda Vivatex Tbk

No.	Kode IDX	Nama Perusahaan
37	RICY	PT. Ricky Putra Globalindo Tbk
38	ROTI	PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk
39	SCCO	PT. Supreme Cable Manufacturing Corporation Tbk
40	SIDO	PT. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk
41	SKBM	PT. Sekar Bumi Tbk
42	SMBR	PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk
43	SMCB	PT. Holcim Indonesia Tbk
44	SMSM	PT. Selamat Sempurna Tbk
45	TCID	PT. Mandom Indonesia Tbk
46	TOTO	PT. Surya Toto Indonesia Tbk
47	TRIS	PT. Trisula International Tbk
48	TSPC	PT. Tempo Scan Pacific Tbk
49	TURI	PT. Tunas Ridean Tbk
50	ULTJ	PT. Ultra Jaya Milk Industry Tbk
51	UNTR	PT. United Tractors Tbk
52	WIIM	PT. Wismilak Inti Makmur Tbk



Lampiran 2: Daftar Item Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

No.	Kategori Item Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i>
I. Lingkungan	
1	Pengendalian polusi kegiatan operasi; pengeluaran riset dan pengembangan untuk pengurangan polusi.
2	Pernyataan yang menunjukkan bahwa operasi perusahaan tidak mengakibatkan polusi atau memenuhi ketentuan hukum dan peraturan polusi.
3	Pernyataan yang menunjukan bahwa polusi operasi telah atau akan dikurangi.
4	Pencegahan atau perbaikan kerusakan lingkungan akibat pengolahan sumber daya alam misalnya, reklamasi daratan atau reboisasi.
5	Konservasi sumber alam, misalnya mendaur ulang kaca, besi, minyak, air, dan kertas.
6	Penggunaan material daur ulang.
7	Menerima penghargaan berkaitan dengan program lingkungan yang dibuat perusahaan.
8	Merancang fasilitas yang harmonis dengan lingkungan.
9	Kontribusi dalam seni yang bertujuan untuk memperindah lingkungan.
10	Kontribusi dalam pemugaran bangunan sejarah.
11	Pengelolaan limbah.
12	Mempelajari dampak lingkungan untuk memonitor dampak lingkungan perusahaan.
13	Perlindungan lingkungan hidup.
II. Energi	
1	Menggunakan energi secara lebih efisien dalam kegiatan operasi.
2	Memanfaatkan barang bekas untuk memproduksi energi.

No.	Kategori Item Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i>
3	Penghematan energi sebagai hasil produk daur ulang.
4	Membahas upaya perusahaan dalam mengurangi konsumsi energi.
5	Peningkatan efisiensi energi dari produk.
6	Riset yang mengarah pada peningkatan efisiensi energi dari produk.
7	Kebijakan energi perusahaan.
III. Kesehatan dan Keselamatan Kerja	
1	Mengurangi polusi, iritasi, atau risk dalam lingkungan kerja.
2	Mempromosikan keselamatan tenaga kerja dan kesehatan fisik atau mental.
3	Statistik kecelakaan kerja.
4	Mentaati peraturan standart kesehatan dan keselamatan kerja.
5	Menerima penghargaan berkaitan dengan keselamatan kerja.
6	Menetapkan suatu komite keselamatan kerja.
7	Melaksanakan riset untuk meningkatkan keselamatan kerja.
8	Pelayanan kesehatan tenaga kerja.
IV. Lain-Lain Tenaga Kerja	
1	Perekrutan atau memanfaatkan tenaga kerja wanita atau orang cacat.
2	Presentase atau jumlah tenaga kerja wanita atau orang cacat dalam tingkat manajerial.
3	Tujuan penggunaan tenaga kerja wanita atau orang cacat dalam pekerjaan.
4	Program untuk kemajuan tenaga kerja wanita atau orang cacat.
5	Pelatihan tenaga kerja melalui program tertentu ditempat kerja.
6	Memberi bantuan keuangan pada tenaga kerja dalam bidang pendidikan.
7	Mendirikan suatu pusat pelatihan tenaga kerja.
8	Bantuan atau bimbingan untuk tenaga kerja yang dalam proses mengundurkan diri atau yang telah membuat kesalahan.

No.	Kategori Item Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i>
9	Perencanaan kepemilikan rumah karyawan.
10	Fasilitas untuk aktivitas rekreasi.
11	Presentase gaji untuk pensiun.
12	Kebijakan penggajian dalam perusahaan.
13	Jumlah tenaga kerja dalam perusahaan.
14	Tingkat manajerial yang ada.
15	Disposisi staff –dimana staff ditempatkan.
16	Jumlah staff, masa kerja dan kelompok usia mereka.
17	Statistik tenaga kerja, misal : penjualan per tenaga kerja
18	Kualifikasi tenaga kerja yang direkrut.
19	Rencana kepemilikan sahan oleh tenaga kerja.
20	Rencana pembagian keuntungan lain.
21	Informasi hubungan manajemen dengan tenaga kerja dalam meningkatkan kepuasan motifasi kerja.
22	Informasi stabilisasi pekerjaan tenaga kerja dan masa depan perusahaan.
23	Laporan tenaga kerja yang terpisah.
24	Hubungan perusahaan dengan serikat buruh.
25	Gangguan dan aksi tenaga kerja.
26	Informasi bagaimana aksi tenaga kerja dinegoisiasikan.
27	Kondisi kerja secara umum.
28	Reorganisasi perusahaan yang mempengaruhi tenaga kerja.
29	Statistik perputaran tenaga kerja.
V. Produk	
1	Pengembangan produk perusahaan, termasuk pengemasan.

No.	Kategori Item Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i>
2	Gambaran pengeluaran riset dan pengembangan produk.
3	Informasi proyek riset perusahaan untuk memperbaiki produk.
4	Produk memenuhi standart keselamatan.
5	Membuat produk lebih aman untuk konsumen.
6	Melaksanakan riset atas tingkat keselamatan produk perusahaan.
7	Meningkatkan kebersihan atau kesehatan dalam pengelolaan dan penyimpanan produk.
8	Informasi atas keselamatan produk perusahaan.
9	Informasi mutu produk yang dicerminkan dalam penerimaan penghargaan.
10	Informasi yang dapat diverifikasi bahwa mutu produk telah meningkat (ISO 9000).
VI. Keterlibatan Masyarakat	
1	Sumbangan tunai, produk, pelayanan untuk mendukung aktivitas masyarakat, pendidikan dan seni.
2	Tenaga kerja paruh waktu dari mahasiswa atau pelajar.
3	Sebagai sponsor untuk proyek kesehatan masyarakat.
4	Membantu riset medis.
5	Sponsor untuk konferensi pendidikan, seminar, atau pameran seni.
6	Membiayai program beasiswa.
7	Membuka fasilitas perusahaan untuk masyarakat.
8	Sponsor kampanye nasional.
9	Mendukung pengembangan industri lokal.



No.	Kategori Item Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i>
VII. Umum	
1	Tujuan atau kebijakan perusahaan secara umum berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat.
2	Konfirmasi berhubungan dengan tanggung jawab sosial perusahaan selain yang disebutkan diatas.



Lampiran 3: Skor *Corporate Social Responsibility*

Kode	Tahun	Skor Perkategori <i>Corporate Social Responsibility</i>						
		I	II	III	IV	V	VI	VII
ADES	2015	10	4	3	10	6	6	2
	2016	6	5	2	8	4	5	2
AKRA	2015	11	5	5	10	5	7	2
	2016	9	5	3	12	2	2	2
ASGR	2015	12	6	8	9	11	6	2
	2016	11	4	6	10	9	6	2
BATA	2015	10	5	7	9	6	5	2
	2016	7	4	4	8	10	5	2
BTON	2015	3	3	4	5	9	5	2
	2016	3	3	4	3	4	3	2
BUDI	2015	8	2	2	3	3	3	2
	2016	8	2	2	8	6	6	2
CPIN	2015	10	5	3	11	9	3	2
	2016	11	7	6	10	9	5	2
DLTA	2015	9	7	6	9	9	6	2
	2016	9	7	6	9	8	6	2
DVLA	2015	10	7	6	10	5	6	2
	2016	9	6	2	13	5	6	2
EKAD	2015	9	6	6	11	9	5	2
	2016	5	6	2	14	9	5	2
FAST	2015	8	6	6	8	8	8	2
	2016	8	6	6	8	9	6	2
GGRM	2015	9	7	5	9	7	4	2
	2016	9	6	5	9	7	4	2
HMSP	2015	10	5	4	9	6	5	2
	2016	9	6	4	9	5	7	2
IGAR	2015	10	6	6	8	4	6	2
	2016	10	6	6	9	5	6	2
INAI	2015	5	3	4	8	5	3	2
	2016	8	2	6	5	9	4	2
INDF	2015	9	5	5	5	9	8	2
	2016	10	3	5	9	8	8	2
INDS	2015	10	5	6	7	8	8	2
	2016	11	6	5	9	7	7	2
INTD	2015	9	4	5	11	6	7	2
	2016	8	4	5	6	6	7	2

Kode	Tahun	Skor Perkategori <i>Corporate Social Responsibility</i>						
		I	II	III	IV	V	VI	VII
JECC	2015	8	6	2	9	8	6	2
	2016	8	6	5	9	8	4	2
JPFA	2015	8	6	5	5	9	4	2
	2016	8	7	5	5	9	7	2
KAEF	2015	8	6	5	6	8	5	2
	2016	7	5	5	6	10	5	2
KBLM	2015	10	7	5	4	11	2	2
	2016	11	7	5	9	10	6	2
KLBF	2015	10	4	4	9	10	5	2
	2016	10	6	1	9	8	5	2
LION	2015	9	4	5	9	6	4	2
	2016	10	5	5	7	9	3	2
LMPI	2015	11	5	5	9	11	7	2
	2016	12	6	6	7	11	5	2
LMSH	2015	8	4	5	8	8	3	2
	2016	6	5	6	7	6	3	2
LPIN	2015	9	4	2	2	6	4	2
	2016	9	3	2	9	7	3	2
LTLS	2015	9	4	3	10	5	4	2
	2016	10	5	3	9	9	3	2
MBTO	2015	10	5	7	11	8	7	2
	2016	11	5	8	12	8	5	2
MERK	2015	10	5	6	11	7	6	2
	2016	8	5	3	6	8	5	2
MLBI	2015	10	6	6	8	8	5	2
	2016	8	7	6	10	8	5	2
MTDL	2015	7	6	3	10	8	5	2
	2016	9	7	4	7	10	6	2
MYOR	2015	7	6	2	11	8	7	2
	2016	7	6	3	12	8	7	2
PYFA	2015	9	5	6	5	5	3	2
	2016	11	5	9	5	5	3	2
RDTX	2015	3	5	2	7	3	3	2
	2016	4	5	2	3	4	4	2
RICY	2015	8	4	7	6	6	4	2
	2016	7	5	8	6	5	4	2

Kode	Tahun	Skor Perkategori <i>Corporate Social Responsibility</i>						
		I	II	III	IV	V	VI	VII
ROTI	2015	9	7	6	5	9	5	2
	2016	11	6	5	5	4	5	2
SCCO	2015	9	7	8	10	6	7	2
	2016	8	7	8	9	9	7	2
SIDO	2015	8	6	8	7	7	7	2
	2016	8	7	7	7	7	7	2
SKBM	2015	8	5	4	8	7	6	2
	2016	8	3	6	8	7	8	2
SMBR	2015	10	6	7	9	6	3	2
	2016	11	6	7	10	9	3	2
SMCB	2015	5	6	2	5	4	6	2
	2016	10	4	6	8	10	5	2
SMSM	2015	12	7	7	10	2	9	2
	2016	9	6	7	12	7	8	2
TCID	2015	8	7	4	9	9	3	2
	2016	8	7	5	7	10	3	2
TOTO	2015	7	5	3	6	5	5	2
	2016	3	2	3	7	3	5	2
TRIS	2015	7	7	7	4	6	4	2
	2016	7	7	7	4	4	5	2
TSPC	2015	6	5	7	9	6	3	2
	2016	9	6	6	9	7	2	2
TURI	2015	10	7	6	11	9	2	2
	2016	10	6	6	9	10	2	2
ULTJ	2015	11	7	5	4	7	3	2
	2016	10	7	5	3	7	4	2
UNTR	2015	9	6	1	6	6	4	2
	2016	9	7	3	6	6	3	2
WIIM	2015	10	5	2	6	5	4	2
	2016	9	5	3	6	7	6	2

Lampiran 4: Data Effective Tax Rate

Kode	2015		2016	
	Beban PPh	Laba Sebelum PPh	Beban PPh	Laba Sebelum PPh
ADES	11.336.000.000	44.197.500.000	20.850.000.000	61.633.600.000
AKRA	243.792.022.000	1.929.639.881.200	376.198.450.000	1.156.166.676.900
ASGR	280.535.100.000	1.179.655.000.000	169.992.000.000	1.401.050.000.000
BATA	20.924.797.000	70.244.424.300	22.399.609.800	82.146.988.964
BTON	248.048.407.200	787.704.262.097	230.703.590.000	753.020.220.000
BUDI	5.710.000.000	22.125.000.000	6.268.000.000	29.832.000.000
CPIN	58.528.543.000	250.197.742.000	1.731.848.000	3.983.661.000
DLTA	449.030.000.000	2.281.628.000.000	72.538.386.000	327.047.654.000
DVLA	36.543.278.000	144.437.708.000	62.333.656.000	214.417.056.000
EKAD	181.715.824.770	963.069.181.160	282.364.870.841	1.189.449.029.979
FAST	28.430.897.000	133.454.625.000	53.760.084.000	226.365.624.000
GGRM	21.824.410.000	86.735.275.000	22.858.454.000	81.991.396.000
HMSP	31.569.336.000	139.328.644.000	45.892.180.000	201.114.047.000
IGAR	17.866.372.250	63.236.346.206	25.929.032.000	95.774.588.017
INAI	24.695.919.307	57.114.061.880	20.585.763.495	58.097.472.991
INDF	41.730.371.000	198.862.084.000	64.327.470.010	238.995.228.000
INDS	8.200.387.443	41.342.006.595	10.583.748.495	60.140.115.829
INTD	911.368.134.000	3.429.789.259.810	628.679.989.000	1.858.488.980.256
JECC	171.183.104.000	848.896.333.000	159.385.985.000	754.925.515.000
JPFA	168.840.000.000	697.677.000.000	618.859.000.000	2.766.591.000.000
KAEF	111.831.176.750	415.080.000.000	111.427.977.007	383.025.924.570
KBLM	98.334.250.160	472.688.434.909	89.506.715.500	502.888.844.006
KLBF	663.186.962.586	2.720.881.244.459	740.303.526.679	3.091.188.460.230
LION	1.385.289.425.000	4.845.180.991.513	1.437.484.675.000	5.884.671.394.698
LMPI	21.905.643.494	187.778.889.802	11.516.453.749	101.184.077.925
LMSH	1.345.554.500	3.807.172.880	1.944.295.363	3.424.028.642
LPIN	730.240.332.400	1.869.940.179.952	497.643.675.000	1.619.552.120.269
LTLS	272.321.000.000	769.397.000.000	111.348.000.000	431.591.000.000
MBTO	21.776.670.972	168.933.220.866	21.362.908.750	177.812.830.371
MERK	55.746.695.000	339.470.841.000	67.536.323.000	214.916.161.000
MLBI	178.663.000.000	675.572.000.000	338.057.000.000	1.320.186.000.000
MTDL	90.105.000.000	416.739.000.000	106.479.000.000	429.356.000.000
MYOR	386.435.802.950	1.640.494.765.801	475.283.108.250	1.845.683.269.238
PYFA	146.782.668.930	455.497.731.095	190.708.890.128	705.983.407.169
RDTX	1.282.720.487.000	5.603.422.930.300	1.625.528.500.000	5.736.407.567.300
RICY	88.121.407.220	223.977.841.356	85.072.273.480	233.629.443.532
ROTI	1.107.712.914.648	3.782.518.615.088	1.139.639.472.867	3.694.916.841.698
SCCO	48.346.991.338	206.056.283.235	100.356.349.982	439.602.100.346
SIDO	125.047.000.000	560.339.000.000	146.371.000.000	629.082.000.000
SKBM	134.792.852.580	536.289.853.879	165.080.915.850	608.809.950.308
SMBR	89.234.190.000	437.414.252.000	90.190.025.000	590.280.550.000

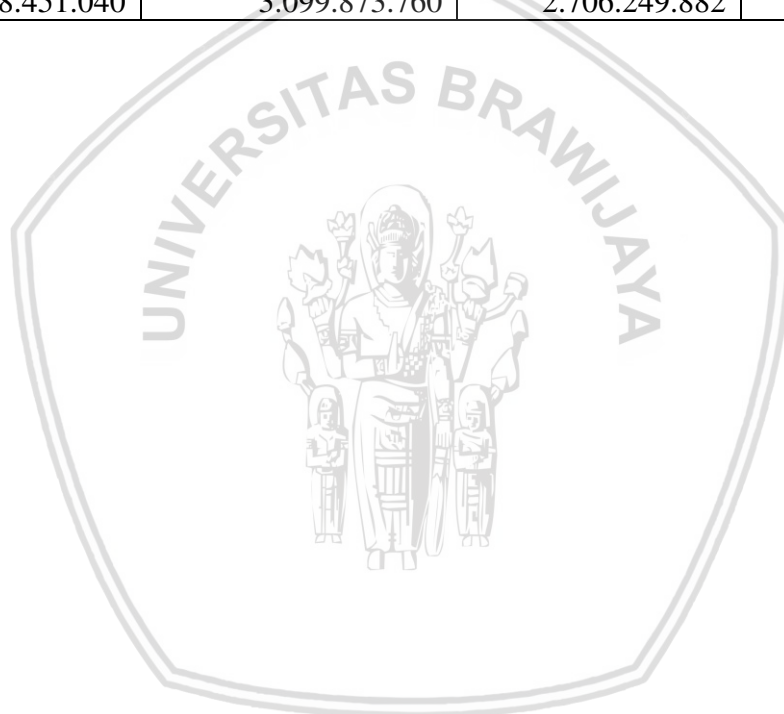
Kode	2015		2016	
	Beban PPh	Laba Sebelum PPh	Beban PPh	Laba Sebelum PPh
SMCB	157.313.000.000	350.418.000.000	34.825.000.000	172.032.000.000
SMSM	982.410.000.000	5.873.717.000.000	1.116.016.000.000	6.258.208.000.000
TCID	68.387.407.750	331.218.947.494	54.517.376.250	221.475.857.643
TOTO	116.337.115.958	381.573.889.661	182.756.308.203	451.320.891.921
TRIS	201.854.872.582	501.693.954.682	215.720.347.979	479.497.291.257
TSPC	177.892.281.060	707.110.932.867	173.464.664.107	718.958.200.369
TURI	510.000.000.000	3.462.000.000.000	310.000.000.000	792.000.000.000
ULTJ	877.588.231.250	7.006.775.250.229	222.657.146.910	9.324.582.782.652
UNTR	111.400.307.000	419.277.746.000	111.625.553.000	6,730,030000
WIIM	487.668.883.000	1.788.879.662.941	291.182.326.250	1.653.866.629.972



Lampiran 5: Data Kepemilikan Instiusional

Kode	2015		2016	
	Jumlah Saham Institusi	Jumlah Saham Beredar	Jumlah Saham Institusi	Jumlah Saham Beredar
ADES	322.347.113	589.896.999	322.347.113	589.896.800
AKRA	2.363.369.655	3.949.030.235	1.552.367.655	3.949.030.235
ASGR	1.125.762.580	1.348.780.500	1.136.752.580	1.348.780.500
BATA	1.032.413.500	1.500.000.000	932.425.500	1.500.000.000
BTON	288.138.000	720.000.000	458.138.000	720.000.000
BUDI	2.385.628.813	4.498.997.362	2.402.568.831	4.498.997.362
CPIN	9.106.738.100	16.398.000.000	5.106.738.100	16.398.000.000
DLTA	653.907.150	800.659.050	753.907.150	800.659.050
DVLA	937.800.912	1.115.925.300	938.811.913	1.115.925.300
EKAD	587.200.720	588.775.000	587.200.720	668.775.000
FAST	1.689.726.601	1.995.138.579	1.689.726.601	1.995.138.579
GGRM	1.091.734.400	1.924.088.000	1.066.536.430	3.224.088.000
HMSP	3.003.768.845	4.652.723.076	107.594.221.125	116.318.076.900
IGAR	820.592.219	972.204.500	824.612.420	972.204.500
INAI	277.064.000	316.800.000	277.066.700	316.800.000
INDF	2.887.532.170	8.780.426.500	2.997.483.470	8.780.426.500
INDS	300.056.640	656.249.710	301.066.641	656.249.710
INTD	78.267.344	190.365.600	78.696.244	190.365.600
JECC	80.903.300	191.200.000	80.303.300	190.200.000
JPFA	7.565.985.835	10.640.198.170	8.486.031.335	11.390.198.170
KAEF	4.999.999.999	5.554.000.000	4.999.999.999	5.554.000.000
KBLM	502.473.800	1.500.000.000	421.022.700	1.500.000.000
KLBF	26.572.005.085	30.875.122.110	26.488.713.385	30.875.122.110
LION	301.515.000	720.160.000	301.415.000	720.160.000
LMPI	1.008.517.669	2.968.046.308	1.008.517.669	2.933.035.457
LMSH	85.072.000	199.000.000	13.672.000	199.000.000
LPIN	10.417.200	31.250.000	10.417.200	31.250.000
LTLS	915.200.000	1.512.662.000	886.428.000	1.512.662.000
MBTO	725.933.000	770.000.000	725.813.000	770.000.000
MERK	207.195.000	318.000.000	308.194.920	448.000.000
MLBI	1.723.151.000	2.107.000.000	1.723.151.000	2.107.000.000
MTDL	1.941.194.842	2.310.169.758	1.977.757.496	2.376.172.964
MYOR	465.717.347	894.347.989	18.846.305.825	22.358.699.725
PYFA	551.599.974	935.080.000	651.599.974	935.080.000
RDTX	165.989.900	698.800.000	166.986.600	698.800.000
RICY	308.287.600	641.717.510	308.287.600	641.717.510
ROTI	2.981.223.500	5.061.100.000	3.511.223.500	5.061.100.000
SCCO	146.275.640	205.583.400	146.275.640	205.583.400
SIDO	12.150.000.000	14.791.339.100	12.150.000.000	14.879.469.100
SKBM	782.814.909	936.530.894	785.307.491	936.530.894

Kode	2015		2016	
	Beban PPh	Laba Sebelum PPh	Beban PPh	Laba Sebelum PPh
SMBR	8.337.678.500	9.837.678.500	8.337.678.500	9.837.678.500
SMCB	3.380.960.858	9.662.900.000	7.329.094.625	9.662.900.000
SMSM	931.935.380	939.668.860	907.741.520	958.675.440
TCID	159.607.767	201.066.667	158.610.767	201.066.667
TOTO	3.034.686.400	10.320.000.000	1.531.686.400	10.320.000.000
TRIS	190.085.200	1.045.531.525	190.000.000	1.045.531.525
TSPC	4.017.335.218	4.500.000.000	4.028.839.418	4.500.000.000
TURI	4.983.326.700	5.580.000.000	4.872.018.000	5.580.000.000
ULTJ	2.402.853.926	2.888.382.000	2.799.177.365	2.888.382.000
UNTR	2.019.338.873	3.730.135.136	1.819.338.873	3.730.135.136
WIIM	1.908.451.040	3.099.873.760	2.706.249.882	3.099.873.760



Lampiran 6: Data Komisaris Independen

Kode	2015		2016	
	Jumlah Anggota Dewan Komisaris dari Luar Perusahaan	Seluruh Anggota Dewan Komisaris Perusahaan	Jumlah Anggota Dewan Komisaris dari Luar Perusahaan	Seluruh Anggota Dewan Komisaris Perusahaan
ADES	1	3	1	3
AKRA	1	3	1	3
ASGR	2	4	2	4
BATA	2	5	2	4
BTON	1	2	1	2
BUDI	1	3	1	3
CPIN	2	5	2	4
DLTA	1	3	2	5
DPNS	1	3	1	3
DVLA	1	3	3	7
EKAD	2	6	1	2
FAST	2	6	2	6
GGRM	2	4	2	4
HMSP	2	5	2	6
IGAR	1	2	1	3
INAI	2	4	2	4
INDF	3	8	3	8
INDS	1	3	1	3
INTD	1	3	1	3
JECC	1	3	2	3
JPFA	2	4	2	5
KAEF	2	5	1	5
KBLM	1	3	1	3
KLBF	3	7	3	5
LION	1	3	1	7
LMPI	1	2	1	3
LMSH	1	3	1	2
LPIN	2	4	1	3
LTLS	2	5	5	3
MBTO	1	3	1	7
MERK	1	3	1	3
MLBI	2	4	4	3
MTDL	1	3	1	7

Kode	2015		2016	
	Jumlah Anggota Dewan Komisaris dari Luar Perusahaan	Seluruh Anggota Dewan Komisaris Perusahaan	Jumlah Anggota Dewan Komisaris dari Luar Perusahaan	Seluruh Anggota Dewan Komisaris Perusahaan
MYOR	1	5	1	3
PYFA	1	3	2	3
RDTX	1	3	1	4
RICY	1	3	1	2
ROTI	3	5	1	3
SCCO	1	3	1	3
SIDO	1	3	1	3
SKBM	1	3	1	3
SMBR	3	5	3	3
SMCB	3	7	2	5
SMSM	1	3	1	7
TCID	2	5	3	3
TOTO	2	5	3	6
TRIS	1	3	1	5
TSPC	2	4	3	3
TURI	1	5	1	6
ULTJ	1	3	2	5
UNTR	1	3	1	6
WIIM	1	3	1	3

Lampiran 7: Data Leverage

Kode	2015		2016	
	Total Liabilities	Total Equity	Total Liabilities	Total Equity
ADES	1.205.491	6.500.324	187.625	767.479
AKRA	5.045.552.087	15.203.129.563	1.940.712.863	15.830.740.710
ASGR	9.921.340	18.180.083	699.683	1.723.468
BATA	271.319.249	795.257.974	318.529.480	804.742.917
BTON	21.674.463.531	183.116.245.288	32.340.917.850	177.290.628.918
BUDI	669.593	3.295.953	6.760.090	29.031.807
CPIN	3.992.996.152	10.280.499.400	6.426.152	2.400.916.656
DLTA	99.980.940	236.315.083	89.580.546	296.062.953
DVLA	276.462.785	1.376.278.237	277.358.436	1.531.365.558
EKAD	989.135.731.998	1.896.915.895.500	311.393.372.541	992.508.630.708
FAST	40.575.706.000	120.990.931.050	7.793.612.690	25.770.819.573
GGRM	19.524.180	62.951.634	19.488.410	63.500.413
HMSP	14.559.900	37.801.724	11.047.850	42.508.277
IGAR	14.077.815.153	38.393.940.590	13.365.755.813	34.394.673.296
INAI	138.308.151.083	1.930.309.296.537	149.593.711.781	1.339.032.413.455
INDF	236.023.950	918.831.526	190.136.510	892.174.515
INDS	989.882.575.049	1.953.928.346.219	850.509.262.804	2.072.720.502.538
INTD	1.228.021.834.512	4.786.007.625.594	11.654.672.213.000	46.760.889.270.000
JECC	497.423.814	1.358.464.081	564.327.450	1.587.210.576
JPFA	56.971.040	171.008.566	46.845.130	192.951.026
KAEF	995.695.908.949	3.434.879.313.034	619.994.526.842	6.125.690.291.000
KBLM	2.426.436.913.410	6.543.805.717.061	3.932.642.730.230	6.390.918.365.917
KLBF	2.192.250.905.307	6.696.417.381.439	2.945.000.282.472	9.226.009.210.657
LION	751.037.129.224	1.933.580.150.373	562.676.337.255	1.685.812.995.987
LMPI	397.844.031.718	610.364.824.722	340.580.088.002	593.093.512.600
LMSH	20.349.368.640	133.782.751.041	20.034.936.864	162.828.169.250
LPIN	39.907.960.032	324.054.785.280	34.081.054.848	277.838.306.256
LTLS	10.046.466	53.903.330	15.302.721	56.958.360
MBTO	65.624.793.028	118.899.377.240	59.747.712.801	99.959.168.088
MERK	356.676.410	641.646.818	106.402.960	743.934.894
MLBI	1.149.146	4.900.853	1.128.137	2.275.038
MTDL	1.592.310	3.496.665	1.114.289	3.876.021
MYOR	2.996.759.886.340	11.342.997.158.620	2.997.731.145.530	12.929.924.218.540
PYFA	221.954.186.830	1.599.501.537.229	393.620.425.733	1.670.652.795.608
RDTX	91.913.075.713	1.872.158.609.529	98.596.811.505	2.101.753.788.854
RICY	139.916.773.299	1.288.683.925.066	154.429.743.296	1.198.193.867.892
ROTI	921.868.678.348	3.063.823.637.034	11.563.872.623.100	29.196.040.858.718

Kode	2015		2016	
	Total Liabilities	Total Equity	Total Liabilities	Total Equity
SCCO	316.535.669.710	1.381.944.328.632	343.564.705.692	2.449.935.491.586
SIDO	1.084.060	2.987.614	2.115.686	2.796.111
SKBM	16.428.887.924.725	7.644.842.000.048.710	121.979.429.549	199.901.657.012.000
SMBR	84.621.762	3.268.667.933	955.881.605	43.968.876.996
SMCB	4.978.614.267	173.756.470.875	6.391.180	18.769.763.133
SMSM	208.148	2.220.108	166.203	2.254.740
TCID	222.930.621.643	290.820.968.703	223.305.151.868	2.018.801.038.101
TOTO	387.878.582.652	2.844.340.859.205	468.416.609.176	2.581.448.408.262
TRIS	18.882.652.361	57.778.646.557	11.308.062.082	63.981.164.511
TSPC	251.101.467.010	6.284.729.099.203	297.120.986.625	6.585.807.349.438
TURI	607.386	43.681.587	486.291	4.977.673
ULTJ	180.862.036.933	353.959.190.248	156.440.554.888	492.199.641.365
UNTR	21.847.890	63.991.229	30.133.380	61.715.399
WIIM	97.285.512.883	199.700.045.391	98.828.979.411	435.699.413.227



Lampiran 8: Data Variabel Dependen dan Independen

Perusahaan	Tahun	ETR	CSR	INST	KI	AUD	LEV
ADES	2015	0,2565	0,5256	0,5464	0,3333	3	0,1855
ADES	2016	0,3383	0,4103	0,5464	0,3333	3	0,2445
AKRA	2015	0,1263	0,5769	0,5985	0,5000	3	0,3319
AKRA	2016	0,3254	0,4487	0,3931	0,5000	5	0,1226
ASGR	2015	0,2378	0,6923	0,8347	0,4000	3	0,5457
ASGR	2016	0,1213	0,6154	0,8428	0,5000	3	0,4060
BATA	2015	0,2979	0,5641	0,6883	0,4000	3	0,3412
BATA	2016	0,2727	0,5128	0,6216	0,5000	4	0,3958
BTON	2015	0,3149	0,3974	0,4002	0,5000	3	0,1184
BTON	2016	0,3064	0,2821	0,6363	0,5000	4	0,1824
BUDI	2015	0,2581	0,2949	0,5303	0,3333	3	0,2032
BUDI	2016	0,2101	0,4359	0,5340	0,3333	3	0,2329
CPIN	2015	0,2339	0,5513	0,5554	0,4000	2	0,3884
CPIN	2016	0,4347	0,6410	0,3114	0,5000	5	0,0027
DLTA	2015	0,1968	0,6154	0,8167	0,3333	3	0,4231
DLTA	2016	0,2218	0,6026	0,9416	0,4000	3	0,3026
DVLA	2015	0,2530	0,5897	0,8404	0,3333	5	0,2009
DVLA	2016	0,2907	0,5513	0,8413	0,4286	3	0,1811
EKAD	2015	0,1887	0,6154	0,9973	0,3333	5	0,5214
EKAD	2016	0,2374	0,5513	0,8780	0,5000	3	0,3137
FAST	2015	0,2130	0,5897	0,8469	0,3333	5	0,3354
FAST	2016	0,2375	0,5769	0,8469	0,3333	4	0,3024
GGRM	2015	0,2516	0,5513	0,5674	0,5000	4	0,3101
GGRM	2016	0,2788	0,5385	0,3308	0,5000	3	0,3069
HMSP	2015	0,2266	0,5256	0,6456	0,4000	3	0,3852
HMSP	2016	0,2282	0,5385	0,9250	0,3333	4	0,2599
IGAR	2015	0,2825	0,5385	0,8441	0,5000	3	0,3667
IGAR	2016	0,2707	0,5641	0,8482	0,3333	3	0,3886
INAI	2015	0,4324	0,3846	0,8746	0,5000	3	0,0717
INAI	2016	0,3543	0,4615	0,8746	0,5000	3	0,1117
INDF	2015	0,2098	0,5513	0,3289	0,3750	3	0,2569
INDF	2016	0,2692	0,5769	0,3414	0,3750	4	0,2131
INDS	2015	0,1984	0,5897	0,4572	0,3333	3	0,5066
INDS	2016	0,1760	0,6026	0,4588	0,3333	3	0,4103
INTD	2015	0,2657	0,5641	0,4111	0,3333	3	0,2566
INTD	2016	0,3383	0,4872	0,4134	0,3333	3	0,2492
JECC	2015	0,2017	0,5256	0,4231	0,3333	3	0,3662

Perusahaan	Tahun	ETR	CSR	INST	KI	AUD	LEV
JECC	2016	0,2111	0,5385	0,4222	0,6667	3	0,3555
JPFA	2015	0,2420	0,5000	0,7111	0,5000	3	0,3331
JPFA	2016	0,2237	0,5513	0,7450	0,4000	4	0,2428
KAEF	2015	0,2694	0,5128	0,9003	0,4000	5	0,2899
KAEF	2016	0,2909	0,5128	0,9003	0,2000	3	0,1012
KBLM	2015	0,2080	0,5256	0,3350	0,3333	5	0,3708
KBLM	2016	0,1780	0,6410	0,2807	0,3333	3	0,6153
KLBF	2015	0,2437	0,5641	0,8606	0,4286	3	0,3274
KLBF	2016	0,2395	0,5256	0,8579	0,4286	3	0,3192
LION	2015	0,2859	0,5000	0,4187	0,3333	3	0,3884
LION	2016	0,2443	0,5256	0,4185	0,3333	4	0,3338
LMPI	2015	0,1167	0,6410	0,3398	0,5000	3	0,6518
LMPI	2016	0,1138	0,6282	0,3438	0,5000	3	0,5742
LMSH	2015	0,3534	0,4872	0,4275	0,3333	3	0,1521
LMSH	2016	0,5678	0,4487	0,0687	0,3333	3	0,1230
LPIN	2015	0,3905	0,3718	0,3334	0,5000	3	0,1232
LPIN	2016	0,3073	0,4487	0,3334	0,3333	3	0,1227
LTLS	2015	0,3539	0,4744	0,6050	0,4000	3	0,1864
LTLS	2016	0,2580	0,5256	0,5860	0,7143	3	0,2687
MBTO	2015	0,1289	0,6410	0,9428	0,3333	2	0,5519
MBTO	2016	0,1201	0,6538	0,9426	0,3333	2	0,5977
MERK	2015	0,1642	0,6026	0,6516	0,3333	3	0,5559
MERK	2016	0,3142	0,4744	0,6879	0,3333	3	0,1430
MLBI	2015	0,2645	0,5769	0,8178	0,5000	3	0,2345
MLBI	2016	0,2561	0,5897	0,8178	0,5714	3	0,4959
MTDL	2015	0,2162	0,5256	0,8403	0,3333	3	0,4554
MTDL	2016	0,2480	0,5769	0,8323	0,3333	4	0,4959
MYOR	2015	0,2356	0,5513	0,5207	0,2000	3	0,2642
MYOR	2016	0,2575	0,5769	0,8429	0,3333	3	0,2318
PYFA	2015	0,3222	0,4487	0,5899	0,3333	3	0,1388
PYFA	2016	0,2701	0,5128	0,6968	0,5000	2	0,2356
RDTX	2015	0,2289	0,3205	0,2375	0,3333	3	0,0491
RDTX	2016	0,2834	0,3077	0,2390	0,5000	2	0,0469
RICY	2015	0,3934	0,4744	0,4804	0,3333	3	0,1086
RICY	2016	0,3641	0,4744	0,4804	0,3333	3	0,0469
ROTI	2015	0,2929	0,5513	0,5890	0,6000	3	0,3009
ROTI	2016	0,3084	0,4872	0,6938	0,3333	3	0,3961
SCCO	2015	0,2346	0,6282	0,7115	0,3333	3	0,2291

Perusahaan	Tahun	ETR	CSR	INST	KI	AUD	LEV
SCCO	2016	0,2283	0,6410	0,7115	0,3333	2	0,1402
SIDO	2015	0,2232	0,5769	0,8214	0,3333	3	0,3629
SIDO	2016	0,2327	0,5769	0,8166	0,3333	3	0,7567
SKBM	2015	0,2513	0,5128	0,8359	0,3333	3	0,0021
SKBM	2016	0,2712	0,5385	0,8385	0,3333	3	0,0006
SMBR	2015	0,2040	0,5513	0,8475	0,6000	3	0,0259
SMBR	2016	0,1528	0,6154	0,8475	0,6000	4	0,0217
SMCB	2015	0,4489	0,3846	0,3499	0,4286	3	0,0287
SMCB	2016	0,2024	0,5769	0,7585	0,2857	3	0,0003
SMSM	2015	0,1673	0,6282	0,9918	0,3333	3	0,0938
SMSM	2016	0,1783	0,6538	0,9469	0,3333	2	0,0737
TCID	2015	0,2065	0,5385	0,7938	0,5000	4	0,7666
TCID	2016	0,2462	0,5385	0,7888	0,4000	4	0,1106
TOTO	2015	0,3049	0,4231	0,2941	0,6000	3	0,1364
TOTO	2016	0,4049	0,3205	0,1484	0,3333	3	0,1815
TRIS	2015	0,4023	0,4744	0,1818	0,3333	3	0,3268
TRIS	2016	0,4499	0,4615	0,1817	0,5000	5	0,1767
TSPC	2015	0,2516	0,4872	0,8927	0,5000	3	0,0400
TSPC	2016	0,2413	0,5256	0,8953	0,2000	4	0,0451
TURI	2015	0,1473	0,6026	0,8931	0,2000	3	0,0139
TURI	2016	0,3914	0,5769	0,8731	0,3333	3	0,0977
ULTJ	2015	0,1252	0,5000	0,8319	0,3333	3	0,5110
ULTJ	2016	0,0239	0,4872	0,9691	0,3333	4	0,3178
UNTR	2015	0,2657	0,4359	0,5414	0,3333	3	0,3414
UNTR	2016	0,2101	0,4615	0,4877	0,3333	3	0,4883
WIIM	2015	0,2726	0,4359	0,6157	0,3333	3	0,4872
WIIM	2016	0,1761	0,4872	0,8730	0,3333	3	0,2268

Lampiran 9: Hasil Pengujian Hipotesis

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	LEV, KI, AUD, INST, CSR	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: ETR

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,649 ^a	,421	,391	,0656642

a. Predictors: (Constant), LEV, KI, AUD, INST, CSR

b. Dependent Variable: ETR

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,301	5	,060	13,974	,000 ^a
	Residual	,414	96	,004		
	Total	,715	101			

a. Predictors: (Constant), LEV, KI, AUD, INST, CSR

b. Dependent Variable: ETR

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,467	,059		7,972	,000
	CSR	-,262	,094	-,260	-2,793	,006
	INST	-,105	,031	-,295	-3,403	,001
	KI	,021	,066	,025	,314	,754
	AUD	,010	,010	,079	1,022	,309
	LEV	-,159	,040	-,333	-3,941	,000

a. Dependent Variable: ETR

